



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pulau Punjung, Maret 2023





Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya yaitu:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN
BERBUDAYA”**

sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya jangka waktu 5 tahun periode 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya telah berhasil dalam melaksanakan kinerja, dengan adanya laporan ini diharapkan jadi bahan evaluasi agar kedepannya lebih terukur antara Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan , Pelaksanaan, dan Evaluasi untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat Dharmasraya.



Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari partisipasi, kerjasama serta kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dunia swasta dan aparat pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhirnya atas kontribusi tersebut kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih.





Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Daerah untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerja-

nya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi. Pemerintah untuk terus

meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus memuat visi, misi Kepala Daerah, termasuk tujuan dan sasaran serta tolok ukur /Indikator kinerja Utama yang jelas dapat diukur, diuji dan diandalkan atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai guna perwujudan Visi **"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"** bermakna Hadirnya di Kabupaten Dharmasraya pada priode 2021-2026 yang memuat definisi :

Maju:

Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri:

Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya



Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Misi-misi tersebut diatas dalam LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Melalui langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sebagai perangkat negara dalam pelaksanaan Revolusi mental Bangsa. Kemudian dari pada itu yang pasti masyarakat mendapatkan hasil dari Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 SEKILAS TENTANG DHARMASRAYA	1
1.2 GAMBARAN PENDUDUK DHARMASRAYA	2
1.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	3
1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.....	6
2.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	7
2.3 Perjanjian Kinerja 2022.....	7
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022	12
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022	25
3.2 Analisa Capaian Per Sasaran Kinerja	40
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022	89
BAB 4. PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	
Sebelum Perubahan	7
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	
Setelah Perubahan	10
Tabel 3 Belanja Langsung Pegawai dan Belanja Operasional Perkantoran Tahun 2022.....	12
Tabel 4 Program dan Total Anggaran Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	12
Tabel .5 Matrik Perencanaan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	19
Tabel 6 Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	25
Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan	27
Tabel 8 Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	30
Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2022	33
Tabel 10 Analisis Efektifitas kegiatan terhadap capaian Sasaran Strategis.....	36
Tabel 11 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis	37
Tabel 12 Jumlah Pegawai Kabupaten Dharmasraya per tanggal 31 Desember 2022	39
Tabel 13 Perbandingan Rasio pegawai Kabupaten Dharmasraya,.....	40
Tabel 14 Realisasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.....	89

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 Capaian Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2021 S/D 2022 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	41
GRAFIK 2 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	41
GRAFIK 3 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelaanjutan Tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	44
GRAFIK 4 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelaanjutan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022.....	45
GRAFIK 5 Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelaanjutan Tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	48
GRAFIK 6 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelaanjutan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	48
GRAFIK 7 Capaian Persentase lingkungan permukiman kumuh tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	52
GRAFIK 8 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase lingkungan permukiman Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	53
GRAFIK 9 Capaian Rasio pemukiman layak huni tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	54
GRAFIK 10 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio pemukiman layak huni Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	54
GRAFIK 11 Capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	56

GRAFIK 12 Capaian Angka Harapan Hidup tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	57
GRAFIK 13 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	57
GRAFIK 14 Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	58
GRAFIK 15 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	59
GRAFIK 16 Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	60
GRAFIK 17 Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	60
GRAFIK 18 Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	61
GRAFIK 19 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	61
GRAFIK 20 Capaian PDRB Per Kapita tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	62
GRAFIK 21 Perbandingan Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022.....	63
GRAFIK 22 Capaian Indikator Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	64
GRAFIK 23 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional Indonesia Tahun 2022	64
GRAFIK 24 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	65

GRAFIK 25 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	65
GRAFIK 26 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	66
GRAFIK 27 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	67
GRAFIK 28 Capaian Indikator Indeks Perilaku Antikorupsi tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	68
GRAFIK 29 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	68
GRAFIK 30 Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	69
GRAFIK 31 Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	70
GRAFIK 32 Capaian Indikator Nilai LPPD tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	73
GRAFIK 33 Capaian Indikator Indeks SPBE tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	74
GRAFIK 34 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022.....	75
GRAFIK 35 Capaian Indikator Indeks Profesionalisme ASN tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	76
GRAFIK 36 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	76
GRAFIK 37 Capaian Indikator Publik Service Indeks tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	77

GRAFIK 38 Perbandingan Capaian Kinerja Publik Service Indeks Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	77
GRAFIK 39 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	78
GRAFIK 40 Capaian Indikator Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	80
GRAFIK 41 Capaian Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	81
GRAFIK 42 Capaian Indikator Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	82
GRAFIK 43 Capaian Indikator Kese tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	83
GRAFIK 44 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	84
GRAFIK 45 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	84
GRAFIK 46 Capaian Indikator Indeks Resiko Bencana Daerah tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	85
GRAFIK 47 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022	85
GRAFIK 48 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Zakat tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026	86
GRAFIK 49 Capaian Indikator Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	87
GRAFIK 50 Capaian Indikator Jumlah Nagari Beradat dan Berbudaya tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026.....	88



BAB I

PENDAHULUAN



- 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- 1.2 Mandat dan Peran Strategis**
- 1.3 Sistematika Laporan**

BAB 1. PENDAHULUAN

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkret dan konsekuensi. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

1.1 SEKILAS TENTANG DHARMASRAYA

Dharmasraya adalah nama sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Letak geografis Kabupaten Dharmasraya 00048'25,4"- 1041'40,3" LS dan 10108'32,5"-101053'30,2" BT.. Luas wilayah berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 Km² (296.113 Ha). Sebesar 87,4% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian, sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha.

Dengan posisi sangat strategis berada di segitiga emas Sumbar, Riau dan Jambi, persisnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan batas sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 wilayah administrasi Kecamatan dan 52 Nagari atau pemerintahan setingkat Desa. Selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemerintah Kabupaten) Dharmasraya menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Pemerintah Kabupaten membentuk 18 dinas daerah, 3 (tiga) badan dan 1 (Satu) kantor. Dengan komposisi tersebut diharapkan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

Dilingkungan legislatif, ada 30 anggota DPRD yang berasal dari 10 partai politik. Sebagian dari anggota legislatif telah duduk sebagai anggota DPRD dalam beberapa periode. Dan juga sebagian besar anggota DPRD adalah berpendidikan sarjana. Dengan demikian, kualitas legislatif dianggap cukup mumpuni untuk bekerjasama dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan cita cita pembangunan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya,Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki 3.451 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah, baik sebagai pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana. Dilihat dari golongannya, sebagian besar ASN yang ada merupakan pegawai golongan III dengan pendidikan sarjana. Ini berarti, secara umum ASN di Kabupaten Dharmasraya memiliki kemampuan cukup untuk mengemban tugas di lingkungan masing masing

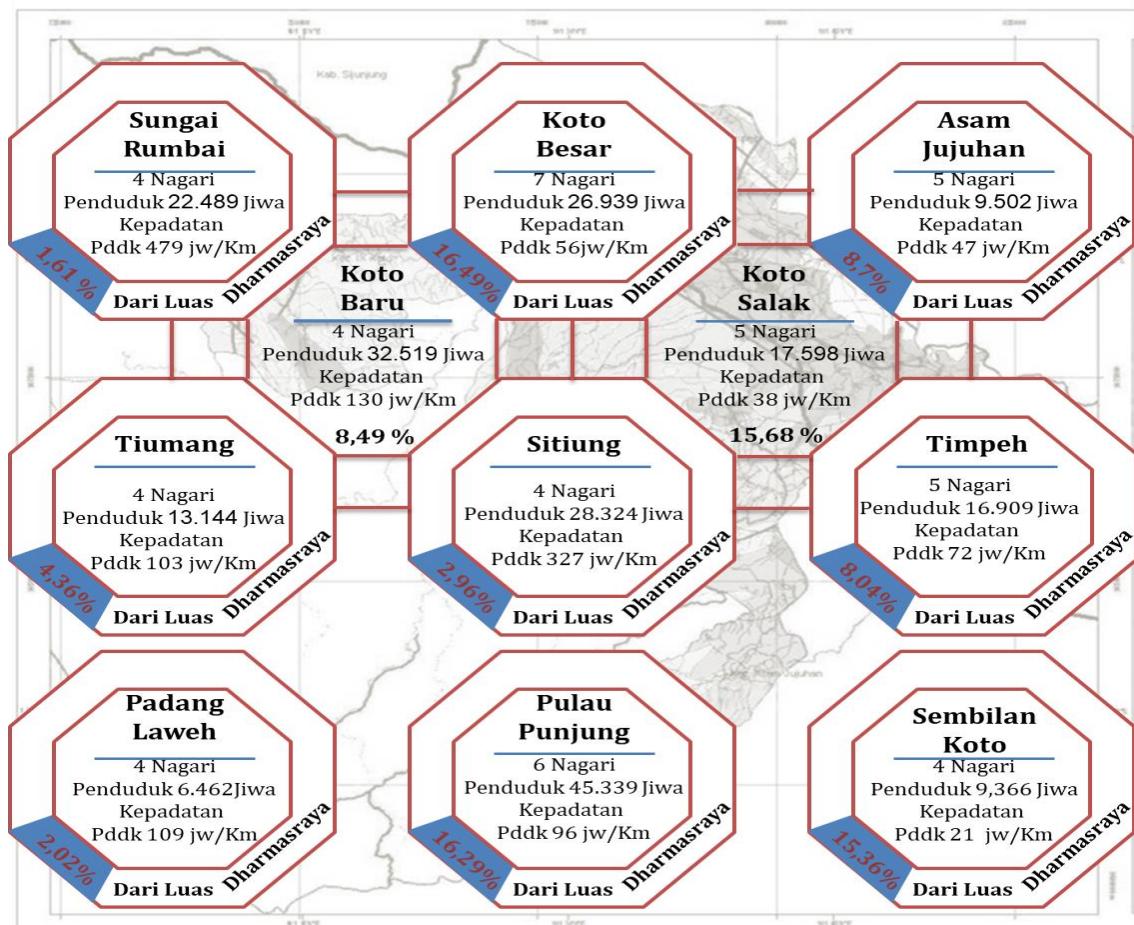
Dari segi Pendidikan, sebanyak 521 orang atau 50,98% dari seluruh ASN diluar tenaga Pendidikan dan tenaga Kesehatan di lingkungan Kabupaten Dharmasraya merupakan lulusan pendidikan strata I, 202 orang (19,77%) dengan jenjang pendidikan S2, dan hanya 106 orang (10,37%) yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma I,II, dan III.

1.2 GAMBARAN PENDUDUK DHARMASRAYA

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 228.591 orang dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai (479 Jiwa/Km²), Sebagian besar wilayah Kabupaten Dharmasraya telah dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang mencapai 87,74 persen dari total luas wilayah.

Pemanfaatan lahan untuk pengembangan usaha ini telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Dengan memanfaatkan lahan, khususnya untuk pengembangan sektor pertanian secara luas, maka kebutuhan pangan dan papan masyarakat telah terpenuhi. Selain itu, usaha pertanian yang dilakukan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini. Dengan membaiknya pendapatan, maka masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya dengan lebih baik. Ini terlihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 sebesar 72,3.

Gambar 1-1 Kependudukan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2022

1.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1.3.1 Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)

No.	Permasalahan
1	Jalan dan jembatan, rendahnya persentase jalan mantap diantaranya disebabkan oleh ; rendahnya kualitas jalan, kurangnya bangunan kelengkapan jalan (jembatan, drainase, bahu jalan), ketidak sesuaian antara kelas jalan dengan tonase kendaraan yang melewati, dan kurangnya pemeliharaan jalan.
2	Pelayanan transportasi (rendahnya konektivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan dan aksesibilitas yang tidak didukung kelengkapan jalan yang berkeselamatan)
3	Rendahnya cakupan layanan air bersih yang layak disebabkan oleh belum meratanya pembangunan SPAM baik perkotaan maupun perdesaan)
4	Rendahnya aksesibilitas sanitasi disebabkan oleh infrastruktur sanitasi yang belum memadai

	serta jangkauan pelayanan yang belum merata)
5	komunikasi dan informasi, masih adanya blankspot kawasan tertentu untuk menunjang jaringan telekomunikasi masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis seperti kawasan terisolir;
6	Lingkungan Hidup dan kebencanaan: meningkatnya fungsi lahan, aktivitas <i>illegal mining</i> dan <i>illegal logging</i> yang mengakibatkan rendahnya kualitas air, dan meningkatnya daya rusak air terhadap kawasan pemukiman dan lahan pertanian;
7	Belum adanya ruang publik untuk interaksi sosial

1.3.2 Permasalahan pembangunan sumber daya manusia

No.	Permasalahan
1	Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> a. lambatnya perkembangan harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. b. Relatif rendahnya APM/APK SMP dibandingkan APM/APK SD c. rendahnya budaya baca dan literasi
2	Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> d. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan karena kurangnya SDM kesehatan e. Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV, diare) yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan kualitas lingkungan, perilaku dan gaya hidup f. Tingginya kasus penyakit tidak menular (jantung, diabet, ginjal) yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup

1.3.3 Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

No.	Permasalahan
1	Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan relatif rendahnya PDRB perkapita dibandingkan provinsi Sumatera Barat
2	Menurunnya produktivitas komoditi tanaman perkebunan
3	Stagnannya produksi dan produktivitas tanaman pangan
4	Kurang stabilnya harga komoditi perkebunan
5	Belum optimalnya penanggulangan penyakit menular ternak

6	pengelolaan potensi peternakan kurang memperhatikan kearifan lokal
7	Belum optimalnya potensi objek wisata dan belum berkembangnya event wisata

1.3.4 Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi)

No.	Permasalahan
1	Rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah
2	Lemahnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah
4	Belum semua OPD memiliki perkantoran yang representatif

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Kabupaten Dharmasraya

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



- 2.1. Rencana Strategis 2020-20245**
- 2.2. Prioritas Nasional Tahun 20216**
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2021**

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 antara lain bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun, agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya disebutkan Visi Bupati Dharmasraya adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"

Defenisi kalimat Visi RPJMD :

Maju:

Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri:

Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya

Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah
2. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia
3. Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik
5. Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari
6. Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)
7. Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 18 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Bupati Dharmasraya pada akhir periode perencanaan (tahun 2022). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1.

2.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan **astha utama kedua**, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

2.3 Perjanjian Kinerja 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
Sebelum Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	57
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	65
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	36,14
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	88,65
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	69,1
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	Persen	28,54
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,69
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,48
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,44
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	43,81
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3,25
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,68
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,08
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3,194
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	Indeks	BB
		Nilai LPPD	Skor	3,6500
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	Indeks	
		Indeks SPBE	Indeks	1,9
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	65

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	3,03
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,8195
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,7056
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,5950
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	10
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,93
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia	Indeks	130
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Percentase peningkatan zakat	Persen	2
		Percentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	80
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	3

Perjanjian kinerja Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya pada Januari 2022, kemudian dilakukan revisi pada November 2022. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Adanya penyesuaian strategi untuk pemulihan Pemerintah Daerah karena terdampak pandemi Covid-19, antara lain, perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.
2. Beberapa Indikator Kinerja tidak dapat dilakukan penilaian capaian kinerja karena penilaian terhadap indikator tersebut tidak dilaksanakan setiap tahunnya.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Setelah Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	57
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	65
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	36,14
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	88,65
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	69,1
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,69
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,48
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,44
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89
7	Meningkatkan pendapatan	PDRB Per Kapita	Juta	43,81

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
	masyarakat dan daya saing daerah		Rupiah	
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3,25
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,68
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,08
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3,194
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	BB
		Nilai LPPD	Skor	3,6500
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks SPBE	Indeks	1,9
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	65
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	3,03
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,8195
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,7056
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,5950
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,93
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia	Indeks	130
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Percentase peningkatan zakat	Persen	12
		Percentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	80
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	3

Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya setelah Perubahan Tahun 2022 ini dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusun laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran setelah perubahan anggaran tahun 2022, yang terdiri dari 2 (dua) sub alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3 Belanja Langsung Pegawai dan Belanja Operasional Perkantoran Tahun 2022

Alokasi Anggaran	Program	Anggaran (Rp)
Belanja Langsung Pegawai	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	354.326.173.539
Belanja Operasional Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.524.687.876
Total		371.850.861.415

Sedangkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan Bupati yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022, Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

Tabel 4 Program dan Total Anggaran Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	23.039.300
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.830.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	38.292.991.266
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.060.008.987
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.578.404.398
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	851.212.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	104.996.700
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	54.693.200
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	28.477.000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	391.657.000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.765.500
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.995.100
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.239.400

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.804.395.280
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75.799.200
Peningkatan Pelayanan BLUD	17.380.795.330
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.465.357.420
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.201.025.820
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	607.550.000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	169.858.070
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	115.018.512
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.285.050
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.257.354.500
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.347.408.700
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.127.765.580
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20.244.348.036
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	51.621.610.535
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.330.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12.641.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.854.500
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.230.000
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	398.630.800
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	190.392.000
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	68.525.400
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.064.311.900
Penerbitan Izin Membuka Tanah	132.863.000

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	4.036.736.960
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.615.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.392.850
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.345.000
Investigasi Kejadian Kebakaran	7.242.500
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.621.500
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.571.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	31.978.500
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	102.101.600
Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.442.750
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	13.372.600
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.753.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.362.500
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	91.362.400
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.158.500
Pengelolaan Sampah	671.058.350
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	146.351.300
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.746.951.800
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	341.939.200
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	531.680.300
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90.205.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96.363.450
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.839.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	249.600.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	465.750.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	110.899.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.471.950
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	302.723.100
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.439.650
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	115.105.000

Kabupaten/Kota	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	757.115.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.401.932.600
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.699.307.300
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.364.550
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.023.600
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	13.553.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	62.728.500
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	51.600.300
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	592.589.650
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	519.661.300
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.415.950
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.576.950
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	82.968.650
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	117.615.250
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	16.333.500
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	15.273.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.993.350
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	15.863.750
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	308.465.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	175.301.150
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	82402230
Penyelenggaraan Penataan Desa	211.458.100
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	128722300
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3766093520
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1116340000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.317.600
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	174.545.000

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36.108.500
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	23.463.910
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.644.950
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	349143000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	90350915
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	863753850
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	110.181.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.056.200
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	19.956.000
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3713667900
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	146.565.100
Pengembangan Prasarana Pertanian	291.393.950
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	361.382.300
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	758.942.460
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	404890000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1479739250
Pembangunan Prasarana Pertanian	2940524650
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	67968500
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.098.900
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.411.350
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	588.994.650
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.035.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	74.239.368
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	360.216.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	597.692.900
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.032.250
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	602.971.900
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	136.869.700
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.956.942.196
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	747.482.500
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	104.767.300
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110.257.250

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	226.641.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	55.876.750
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.007.343.800
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.442.411.456
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000
Fasilitasi Kerjasama Daerah	37.396.270
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.078.349.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	423.803.000
Penataan Organisasi	260.000.042
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.316.198.650
Administrasi Tata Pemerintahan	547.134.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.486.450.000
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	514.905.800
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	157.351.150
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	180.976.650
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	432.173.064
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	76.540.900
Pengembangan Kompetensi Teknis	12.643.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	928.863.100
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	386.320.250
Mutasi dan Promosi ASN	112.896.600
Pengembangan Kompetensi ASN	639.287.350
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	176.923.700
Layanan Administrasi DPRD	179.660.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.532.243.000
Pembahasan Kerja Sama Daerah	683.685.000
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.477.846.500
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.510.143.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	18.246.253.000
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	695.329.000
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.744.163.150
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	438.069.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	422.775.900
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	112.090.871.813
Pengelolaan Barang Milik Daerah	591.991.500
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	756.788.150
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.096.900
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	20.669.900

Daerah	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	334.356.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	514.806.500
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	131.632.250
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	51.704.650
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	705.175.950
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	43.207.500
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	155.343.600
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	729.974.550
Pendampingan dan Asistensi	768.997.500
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	849.376.880
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	357.224.650
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	115605900
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	29993700
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	914.975.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.364.492.704
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.050.524.134
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.427.010.708
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.881.501.561
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	845.502.150
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.852.750
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	1.650.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.860.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.799.700
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.040.000
TOTAL ANGGARAN	594.019.885.526

Dari jabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki total anggaran sebanyak Rp. 965.870.746.940 , dan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis sebanyak Rp. 594.019.885.526 dan dituangkan kedalam 203 Program yang tersebar diseluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel .5 Matrik Perencanaan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1 Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur												
	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur			Indeks	-	-	60,50	62,7	67	70	73
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	53	57	60	63	65	68	
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	59,86	65	70	80	95	100	
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	90	92	95	97	98	100	
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	22,7	28,89	36,14	43,04	50,67	59,15	68,66	

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			pemukiman								
				Rasio pemukiman layak huni	persen	85,00	85,85	88,65	91,45	94,25	97,05
			Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	68,20	69,10	69,75	71,30	72,80
				Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-	28,26	28,54	28,83	29,12	31,28
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia										
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				71,51	71,66	71,82	71,98	72,13	72,29
			Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,51	71,69	71,87	72,05	72,24
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,48	8,48	8,49	8,49	8,50
				Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	12,45	12,45	12,46
			Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,83	89,00	89,17	89,34	89,50
3	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing										
	Meningkatnya Pertumbuhan				persen	-1,39	2,50	2,90	4,20	4,50	4,70
											4,80

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	PDRB									
	Gini rasio				indeks	0,275	0,270	0,265	0,260	0,255	0,250
	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah		40,48	42,83	43,81	44,79	45,76	46,74	47,72
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen		3,08	3,15	3,25	3,4	3,6	3,7	3,8
	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen		6,07	5,88	5,68	5,49	5,29	5,10	4,90
	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen		6,21	6,14	6,08	6,02	5,97	5,92	5,87
4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien										
	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	44,7	60	65	70	73	76
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks		2,96	3,066	3,194	3,322	3,45	3,578	3,6
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	BB	BB	BB	A	A	
		Nilai LPPD	Skor	3,5138	3,6000	3,6500	3,7000	3,7500	3,8000	3,9000	

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks	99,9					
				Indeks SPBE	indeks	1,35	1,625	1,9	2,175	2,45	3
				Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62	65	68	71	77
			Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21	3,3
				Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	79	80	81	82	83	85
Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Persentase nagari mandiri				persen	7,69	11,53	15,38%	19,23	23,07	30,79
			Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,8189	0,8195	0,8354	0,8437	0,8522
				Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,6986	0,7056	0,7127	0,7198	0,7270
				Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,5891	0,5950	0,6010	0,6070	0,6131
5 Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan											
Terwujudnya	Indeks				indeks	-	68,78	70.21	73.68	75.80	77.80
											78.20

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Pembangunan berkelanjutan									
		Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	-	5	10	10	15	20	35
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	67,94	64,40	64,93	65,47	66,00	66,47	66,55
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	143.20	135	130	125	120	115	110
6	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah										
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Jumlah nagari beradat dan berbudaya		nagari	-	1	3	6	10	13	17
		Meningkatnya pemahaman dan	Persentase peningkatan	persen	2	2	2	2	2	2	2

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	zakat								
				Percentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	77	80	85	90	95	100
			Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-	1	3	6	10	13	17



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Pengukuran Kinerja 2022

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya pada seluruh sasaran strategis yang ditandatangani langsung oleh Bupati Dharmasraya. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun kedua RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 105,92% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	2022			Rata-rata persasaran	Prediket
		Target	Realisasi	Capaian		
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur						
Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	57	58,09	101,91		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	65	88,22	135,72	112,60	Sangat Berhasil
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92	92,15	100,17		
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman						
Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	36,14	13,78	161,88	132,12	Sangat Berhasil
Rasio pemukiman layak huni	Persen	88,65	90,75	102,37		
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air						
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	69,1	83,81	121,28	121,28	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,69	71,90	100,29	100,29	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat						

Indikator Sasaran	Satuan	2022			Rata-rata persasaran	Prediket
		Target	Realisasi	Capaian		
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,48	8,56	100,94		
Harapan lama sekolah	Tahun	12,44	12,51	100,56	100,75	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan						
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89	88,32	99,24	99,24	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 7. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah						
PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	43,81	46,52	106,19	106,02	Sangat Berhasil
Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3,25	3,44	105,85		
Sasaran Strategis 8. Mengurangi pengangguran						
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,68	6,23	90,3169	90,3169	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 9. Mengurangi kemiskinan						
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,08	5,56	108,55	108,55	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 10. Birokrasi yang bersih dan akuntabel						
Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3,194	3,1572**	98,85	96,57	Sangat Berhasil
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP	WTP	100,00		
Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	BB	B**	91,29		
Nilai LPPD	Skor	3,65	3,51**	96,16		
Sasaran Strategis 11. Birokrasi yang berkualitas						
Indeks SPBE	Indeks	1,9	2,43	127,89	112,30	Sangat Berhasil
Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	65	62,86	96,71		
Sasaran Strategis 12. Pelayanan publik yang prima						
Publik service indeks	Indeks	3,03	3,39	111,88	105,94	Sangat Berhasil
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81,00	100,00		
Sasaran Strategis 13. Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari						
Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,8195	0,85	103,40	103,77	Sangat Berhasil
Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,7056	0,72	102,34		
Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,595	0,63	105,58		
Sasaran Strategis 14. Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan						

Indikator Sasaran	Satuan	2022			Rata-rata persasaran	Prediket
		Target	Realisasi	Capaian		
Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80	89,47	111,84	111,84	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 15. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,93	63,90	98,41	98,41	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 16. Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah						
Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	130	143,20**	89,85	89,85	Berhasil
Sasaran Strategis 17. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat						
Persentase peningkatan zakat	Persen	12	12,37	103,05	114,25	Sangat Berhasil
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	80	100	125		
Sasaran Strategis 18. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat						
Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	3	2,00	66,67	66,67	Cukup Berhasil

Keterangan :

* : Realisasi merupakan hasil pengolahan sementara

** : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 12 dari 18 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Bupati Dharmasraya pada tahun 2022, memiliki Realisasi kinerja lebih dari 100% dari yang telah ditargetkan. Untuk mengetahui capaian Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2022		
				Realisasi	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	58,09	73,01	73,78
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air	Persen	88,22	73,07	84,91

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2022		
				Realisasi	Provinsi	Nasional
		minum layak dan berkelanjutan				
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92,15	69,27	80,92
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	13,78	4	2,78
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	90,75	58,18	60,66
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	83,81		
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,90	69,9	71,85
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,56	9,18	8,69
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,51	14,1	13,1
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,32	94,34	91,27
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	46,52	50,593	32,377
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3,44		3,47
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,23	6,28	5,86
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,56	6,04	9,57
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3,16		3,88
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP	WTP	
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	B	BB	
		Nilai LPPD	Skor	3,51		
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks SPBE	Indeks	2,43	2,69	
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	62,86	50,22	
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	3,39		3,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,00		
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,85		
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,72		
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,63		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2022		
				Realisasi	Provinsi	Nasional
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	89,47		
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,90	79,33	72,42
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	143,20	149,53	
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	Persen	12,37		
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	100,00		
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	2		

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 17 indikator kinerja Kabupaten Dharmasraya yang dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan 16 indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tingkat Nasional, dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal antara lain;

11 Indikator Kinerja Kabupaten Dharmasraya masih dibawah capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat, 6 Indikator Kinerja Kabupaten Dharmasraya yang telah melebihi capaian nasional antara lain :

- 1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
- 3) Rasio pemukiman layak huni
- 4) Angka Harapan Hidup
- 5) PDRB Per Kapita
- 6) Tingkat Kemiskinan

6 Indikator Kinerja Kabupaten Dharmasraya masih dibawah capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat, 7 Indikator Kinerja Kabupaten Dharmasraya yang telah melebihi capaian nasional antara lain:

- 1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
- 3) Rasio pemukiman layak huni
- 4) Angka Harapan Hidup
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- 6) Tingkat Kemiskinan
- 7) Indeks Profesionalisme ASN

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Rasio Pertumbuhan atau Growth Ratio ialah salah satu rasio untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam satu atau beberapa periode anggaran yang berlangsung, apakah daerah tersebut berhasil atau tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan secara positif ataupun sebaliknya. Growth Ratio pada dasarnya mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ataupun mempertahankan kinerja yang dicapai dalam kurun satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Mahmudi,2019)

Salah satu instrument dalam mengukur rasio pertumbuhan adalah dengan membandingkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020-2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini;

Tabel 8 Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		
				2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	48,93	58,09
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	60,82	88,22
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	80	92,15
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	22,7	13,66	13,78
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	85	91,98	90,75

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		
				2020	2021	2022
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Per센	67,36	83,81	83,81
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,33	71,53	71,90
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,47	8,55	8,56
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,43	12,44	12,51
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,31	88,31	88,32
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	40,48	44,992	46,52
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Per센	3,08	3,4	3,44
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Per센	5,31	5	6,23
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Per센	6,21	6,67	5,56
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	2,96	3,1572	3,16
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP	WTP	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	B	B	B
		Nilai LPPD	Skor	3,5138	3,51	3,51
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks SPBE	Indeks	1,35	1,09	2,43
12		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	58,04	62,86	62,86
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	2,85	2,85	3,39
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79	81	81,00
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,8108	0,828	0,85
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,6917	0,7087	0,72
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,5833	0,6039	0,63
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Per센	n/a	100	89,47
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,94	59.49	63,90

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		
				2020	2021	2022
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	143,2	143,2	143,20
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	Persen	2	2	12,37
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	75	80	100,00
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	0	0	2

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, namun terdapat 10 indikator kinerja yang mengalami peningkatan realisasi kinerja selama 3 tahun terakhir, ke-10 indikator tersebut antara lain :

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
2. Angka Harapan Hidup
3. Angka rata-rata lama sekolah
4. Harapan lama sekolah
5. PDRB Per Kapita
6. Rasio Net Ekspor terhadap PDRB
7. Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial
8. Rata-rata indeks ketahanan ekonomi
9. Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan
10. Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD di ukur setiap tahunnya dan dibandingkan sudah sejauh mana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat

dari perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target RPJMD tahun 2022, dan realisasi kinerja tahun 2022 sudah sejauh mana untuk mencapai target di akhir masa RPJMD

Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2022
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Indikator Sasaran	Satuan	2022			Target RPJMD Tahun 2022	capaian RPJMD tahun 2022	target akhir RPJMD	CAPAIAN AKHIR TARGET RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian				
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur								
Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	57	58,09	101,91	57	101,91	68	85,43
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	65	88,22	135,72	65	135,72	100	88,22
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92	92,15	100,17	92	100,17	100	92,15
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman								
Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	36,14	13,78	161,8798	36,14	161,88	68,66	179,9
Rasio pemukiman layak huni	Persen	88,65	90,75	102,37	88,65	102,37	100	90,75
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air								
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	69,1	83,81	121,28	69,1	121,28	73,5	114
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,69	71,90	100,29	71,69	100,29	72,42	99,3
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat								
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,48	8,56	100,94	8,48	100,94	8,5	100,7
Harapan lama	Tahun	12,44	12,51	100,56	12,44	100,56	12,46	100,4

Indikator Sasaran	Satuan	2022			Target RPJMD Tahun 2022	capaian RPJMD tahun 2022	target akhir RPJMD	CAPAIAN AKHIR TARGET RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian				
sekolah								
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan								
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89	88,32	99,24	89	99,24	89,67	98,5
Sasaran Strategis 7. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah								
PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	43,81	46,52	106,19	43,81	106,19	47,72	97,5
Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3,25	3,44	105,85	3,25	105,85	3,8	90,5
Sasaran Strategis 8. Mengurangi pengangguran								
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,68	6,23	90,3169	5,68	90,32	4,9	72,867
Sasaran Strategis 9. Mengurangi kemiskinan								
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,08	5,56	108,5526	6,08	108,55	5,87	105,3
Sasaran Strategis 10. Birokrasi yang bersih dan akuntabel								
Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3,194	3,1572	98,85	3,194	98,85	3,6	87,7
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	WTP	WTP
Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	BB	B	91,29	BB	79,88	80 (A)	79,875
Nilai LPPD	Skor	3,65	3,51	96,16	3,65	96,16	3,9	90
Sasaran Strategis 11. Birokrasi yang berkualitas								
Indeks SPBE	Indeks	1,9	2,43	127,89	1,9	127,89	3	81,000
Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	65	62,86	96,71	65	96,71	77	81,636
Sasaran Strategis 12. Pelayanan publik yang prima								
Publik service indeks	Indeks	3,03	3,39	111,88	3,03	111,88	3,4	99,706
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81,00	100,00	81	100,00	85	95,294

Indikator Sasaran	Satuan	2022			Target RPJMD Tahun 2022	capaian RPJMD tahun 2022	target akhir RPJMD	CAPAIAN AKHIR TARGET RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian				
Sasaran Strategis 13. Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari								
Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,8195	0,85	103,40	0,8195	103,40	0,8607	98,455
Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,7056	0,72	102,34	0,7056	102,34	0,7343	98,339
Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,595	0,63	105,58	0,595	105,58	0,6192	101,453
Sasaran Strategis 14. Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan								
Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80	89,47	111,84	10	894,74	35	255,639
Sasaran Strategis 15. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup								
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,93	63,90	98,41	64,93	98,41	66,55	96,018
Sasaran Strategis 16. Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah								
Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	130	143,20	89,85	130	110,15	110	69,82
Sasaran Strategis 17. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat								
Persentase peningkatan zakat	Persen	12	12,37	103,05	2	618,28	2	618,282
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	80	100,00	125,00	80	125,00	100	100,000
Sasaran Strategis 18. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat								
Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	3	2	66,67	3	66,67	17	11,765

3.1.3 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

1. Analisis Efektifitas kegiatan terhadap capaian Sasaran Strategis

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pendapatan yang akan dicapai, yang selanjutnya akan disesuaikan dan dibandingkan dengan aturan target yang telah ditetapkan yang dilihat dari potensi riil daerah yang bersangkutan. Apabila tingkat keefektivitasan suatu daerah semakin meningkat maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah tersebut semakin baik. (Halim, 2012)

Tabel 10 Analisis Efektifitas kegiatan terhadap capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS EFEKTIFITAS
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	16	112,60	Efektif
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	9	132,12	Efektif
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	15	121,28	Efektif
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	35	100,29	Efektif
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	45	100,75	Efektif
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	9	99,24	Efektif
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	33	106,02	Efektif
8	Mengurangi pengangguran	12	90,32	Efektif
9	Mengurangi kemiskinan	19	108,55	Efektif
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	425	96,57	Efektif
11	Birokrasi yang berkualitas	26	112,30	Efektif
12	Pelayanan publik yang prima	33	105,94	Efektif
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	14	103,77	Efektif
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	5	111,84	Efektif
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	15	98,41	Efektif
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	21	89,85	Cukup Efektif

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS EFEKTIFITAS
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	9	114,02	Efektif
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	5	66,67	Cukup Efektif
TOTAL		746,00	103,92	Efektif

2. Analisis Efisiensi Anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis

Rasio Efisiensi merupakan salah satu rasio yang menunjukkan besar biaya yang akan maupun yang dikeluarkan pemerintah suatu daerah dalam memperoleh pendapatan daerahnya dengan melihat pendapatan yang akan diterima oleh daerah tersebut. Apabila rasio efisiensi keuangan suatu daerah semakin kecil, maka yang terjadi semakin baik pula kinerja keuangan daerah yang bersangkutan tersebut. (Mardiasmo, 2013)

Tabel 11 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	Analisis Efisien
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	69.950.759.985	65.768.340.779	94,02	112,60	Efisien
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	9.703.260.560	9.392.799.161	96,80	132,12	Efisien
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	15.413.339.020	13.858.038.386	89,91	121,28	Efisien
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17.746.290.030	15.789.419.304	88,97	100,29	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	63.028.447.501	20.976.128.419	33,28	100,75	Efisien
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1.233.438.400	1.093.381.559	88,65	99,24	Efisien
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	9.678.220.503	9.525.335.818	98,42	106,02	Efisien
8	Mengurangi pengangguran	1.579.197.650	1.552.108.690	98,28	90,32	Cukup Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	Analisis Efisien
9	Mengurangi kemiskinan	1.280.989.750	1.277.763.834	99,75	108,55	Efisien
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	309.812.741.790	206.028.868.277	66,50	96,57	Efisien
11	Birokrasi yang berkualitas	6.120.795.100	5.894.443.767	96,30	112,30	Efisien
12	Pelayanan publik yang prima	22.868.264.786	5.448.550.589	23,83	105,94	Efisien
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	5.222.613.920	5.172.748.789	99,05	103,77	Efisien
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	20.599.651.598	14.458.957.399	70,19	111,84	Efisien
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	1.000.590.200	982.958.123	98,24	98,41	Efisien
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	25.691.030.150	19.257.367.228	74,96	89,85	Efisien
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	7.838.651.130	7.718.346.219	98,47	114,02	Efisien
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	5.251.603.452	5.093.231.818	96,98	66,67	Tidak Efisien
TOTAL		594.019.885.525	409.288.788.159	68,90	103,92	Efisien

3. Analisis Sumber Daya Manusia yang mendukung pencapaian sasaran strategis

Untuk memberikan pelayanan masyarakat (public service) yang professional serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan perbandingan obyektif (rasional) antara jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah penduduk sebagai obyek pelayanan. Perhitungan analisis SDM yang mendukung pencapaian strategis dengan jumlah penduduk guna mencapai target kinerja

yang telah ditetapkan. Tabel jumlah pegawai Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Jumlah Pegawai Kabupaten Dharmasraya per tanggal 31 Desember 2022

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	62
2	Sekretariat Dprd	18
3	Inspektorat	32
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	21
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8
7	Badan Keuangan Daerah	43
8	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	25
9	Dinas Pendidikan	1779
10	Dinas Kesehatan	576
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	22
12	Dinas Pertanian	126
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	19
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	48
15	Dinas Perhubungan	26
16	Dinas Pangan Dan Perikanan	23
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	23
18	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	25
19	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	26
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24
22	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	16
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16
24	Dinas Lingkungan Hidup	19
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	19
26	Rumah Sakit Umum Daerah	252
27	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	7
28	Kecamatan Asam Jujuhan	7
29	Kecamatan Ix Koto	10
30	Kecamatan Koto Baru	17
31	Kecamatan Koto Besar	17
32	Kecamatan Koto Salak	11
33	Kecamatan Padang Laweh	11
34	Kecamatan Pulau Punjung	17
35	Kecamatan Sitiung	15
36	Kecamatan Sungai Rumbai	14
37	Kecamatan Timpeh	13
38	Kecamatan Tiumang	13
JUMLAH		3451

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 228.591 Orang sedangkan ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 berjumlah 3.451 Orang, rasio Penduduk Dharmasraya dengan jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah 1,47 atau diartikan 1,47 orang ASN Dharmasraya melayani 100 orang penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah ASN se-Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, jumlah ASN Dharmasraya masih jauh kekurangan pegawai, perbandingan jumlah pegawai tingkat Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 13 Perbandingan Rasio pegawai Kabupaten Dharmasraya,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**

	Penduduk	Pegawai	Rasio
Kabupaten Dharmasraya	234.713	3.451	1,47
Provinsi Sumatera Barat	2.841.802	79.163*	2,79
Nasional	275.773.800	4.315.181	1,56

Ket:

- * *Tidak termasuk Pegawai Provinsi Sumatera Barat, Hanya jumlah pegawai se Kabupaten dan Kota se- Sumatera Barat*

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa rasio jumlah penduduk Dharmasraya dengan jumlah ASN yang memberikan pelayanan serta mencapai target dari rencana strategis yang telah tertuang dalam RPJMD masih dibawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun, dalam kondisi kekurangan pegawai, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya masih bisa mencapai capaian kinerja yang telah ditargetkan sebesar 105,29%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah bekerja melebihi beban kerja dan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

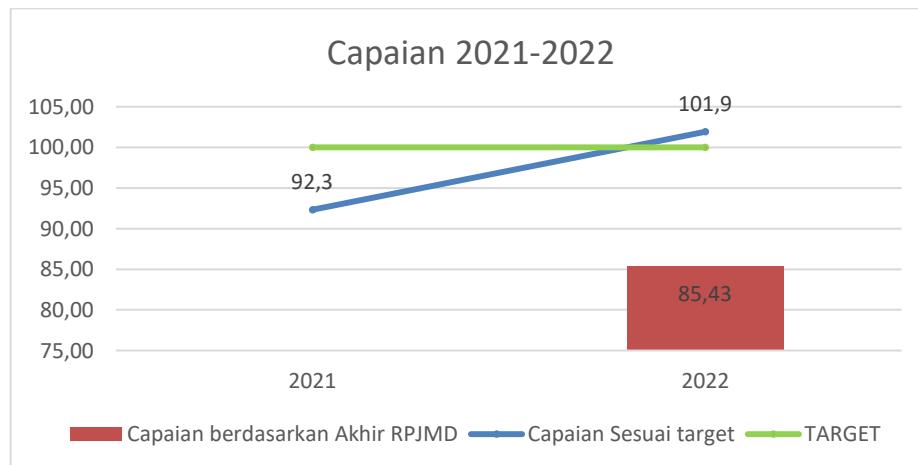
3.2 Analisa Capaian Per Indikator Kinerja

3.2.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

3.2.1.1 Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten

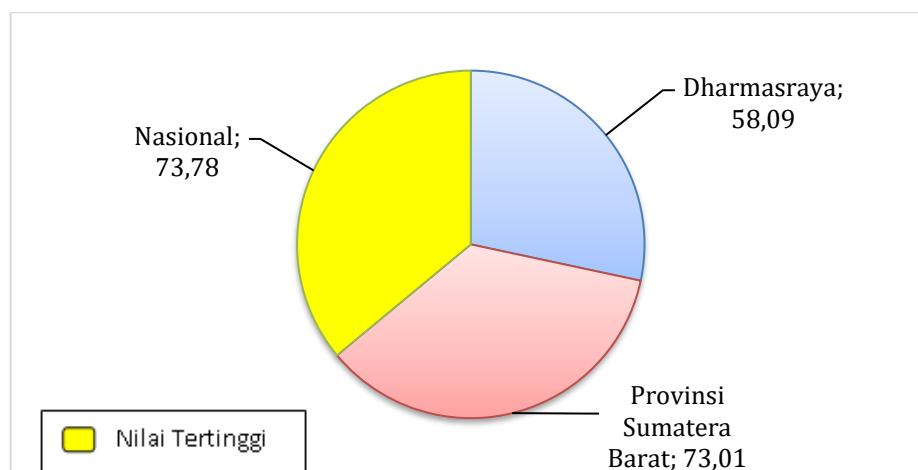
Target rasio kemantapan jalan Kabupaten tahun 2022 adalah 57% dan terealisasi 58,09% dengan capaian kinerja 101,9%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 85,43%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 1 Capaian Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2021 S/D 2022 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026



Rasio kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target, namun masih jauh dari target akhir RPJMD tahun 2026. Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi rasio kemantapan jalan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 2 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio kemantapan jalan kabupaten Dharmasraya masih jauh tertinggal dari capaian Provinsi dan Nasional. Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

a) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan

Di tahun 2022 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sepanjang 611,49 Km di bagi panjang jalan Kabupaten seluruhnya 1.052,66 km, dengan target 52% dengan realisasi sebesar 58,09% dengan capaian 111,71%, dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan, Rehabilitasi jalan, antara lain:

- i. Peningkatan Jalan Simpang Lintas Abai - Koto Salak (R.102) (DAK Fisik) 3 km
 - ii. Peningkatan Jalan Simpang 3 Muaro Momong - Trans Sungai Kambut I (R.22) (DPR) (DAK Fisik) 2,3 Km
 - iii. Peningkatan Jalan Sinamar - Sungai Limau (R.179) 2,25 Km
 - iv. Rehabilitasi Jalan Simp.Mulya Bakti - Cahaya Murni (R.149) 1,6 Km
 - v. Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Pulau Punjung & Kec.Sitiung) 1 Km
 - vi. Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Besar) 1,5 Km
 - vii. Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Sitiung, Kec.Padang Laweh & Kec.Koto Baru) 1,8 Km
 - viii.Jalan Kabupaten Paket IV (Kec.Sungai Rumbai) 0,6 Km
 - ix. Pembukaan/Pengerasan Jalan Koto Besar - Bonjol Kec.Koto Besar
 - x. Rehab dan Rekon Jalan
 - xi. Pembangunan Bronjong Sungai Mauang 7,5x6x5,5 m
 - xii. Rigid Beton Jalan Nagari Lubuk Karak 119,64 x3,5x0,15 m
 - xiii. Conblock Median Jalan Pulau Punjung dan Koto Baru Conblock Natural : 164,36 m²
Conblock Warna : 164,36 m²
 - xiv. Rigid Beton Jalan Sitiung III Jorong I 152x 4x 0,15 m
 - xv. Pembangunan Jalan Pemakaman Tebing Tinggi 150x4x0,15 m
 - xvi. Pemeliharaan Berkala (Purchasing)
 - xvii. Pemeliharaan Jalan Aur Jaya Sitiung V Pas.Mortar = 180 m' - Klas A = 140x 4 x 0,15 -
Sirtu Bahu Jalan = (220 x 1 x 0.15) x 2
 - xviii. Peningkatan Jalan Pengadilan 50 x 4 x 0.4 m
 - xix. Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - Koto Besar 500 x 5 x 0,15 m
 - xx. Rigid Beton Jr.Lubuk Pauh Padang Hilalang Kec.Sembilan Koto 232 x 3 x 0.15 m
 - xxi. Rigid Beton Jr.Sempola Padang Hilalang Kec.Sembilan Koto 232 x 3 x 0.15 m
- b) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jembatan
- Jumlah Jembatan dalam kondisi baik adalah sebanyak 204 unit, dari jumlah jembatan keseluruhan 258 unit, Pada Tahun 2022 Jumlah Jembatan yg dipelihara adalah sebanyak 16 unit deri jumlah jembatan yang rusak sebanyak 70 Unit, target 71% dengan realisasi sebesar 79,07% dengan capaian 111,37%
- i. Pembangunan Jembatan Ruas Pulai - Simpang Tabek (R.57)12,6 x 6 x 1 m
 - ii. Plat Dwiker Batu Kangkung5 x 1 x 1 m
 - iii. Jembatan Box Jr.Lubuk Baru Nagari Alahan Nan Tigo Kec.Asam Jujuhan4,5 x 6 m
 - iv. Pembangunan Jembatan Ampalu Koto Salak3 x 3 x 8 m
 - v. Box Culvert dan DAM Jr.Bukit Gading Koto Laweh1,8 x 7 x 0,2 m
 - vi. Jembatan Plat Dwiker Nagari Ampang Kurangi3,6 x 1,4 x 0,2 m
 - vii. Plat Dwiker dan Galian Jr.Candra Kirana Nag.Sungai Duo Kec.Sitiung4,7 x 1,3 x 0,2 m

- viii. Pengadaan Box Culvert 17 unit (1x1x1) m
 - ix. Jembatan Penghubung Pemukiman Jr.Margo Mulyo Sungai Duo Kec.Sitiung 3,6 x 4 m
 - x. Pembangunan Jembatan Ampalu – Padukan (JB-001/JK-137)2 (1m + 6m + 1m) m
 - xi. RWC Jembatan Pulau Mainan 10 x 2,25 x 4 m
 - xii. Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten
 - xiii. Jembatan Penghubung Jr.Koto ke Jr.Pasar Baru Nagari Ampalu 1 x 5,1 x 3,1 m
 - xiv. Jembatan Sungai Botuang Nagari Sungai Dareh 10 (1x1x1) m
 - xv. Jembatan Sungai Hutan Jr.Koto Padang 2 (1m + 3m + 1m) m
 - xvi. Rehab Jembatan Padukan 90 x 2 m
- c) Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Jalan Dan Pelayanan Transportasi
- i. Panjang ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan 22,09 km
 - ii. V/C (Volume Capaciti Ratio) 0,24
 - iii. Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR 77,82
 - iv. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) B

2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

Dalam mencapai kinerja ini, beberapa masalah ditemukan antara lain

- a) Tinggi nya curah hujan pada saat pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dijadwalkan
- b) Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi air limbah POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koodinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPEDA sebagai coordinator
- c) Belum adanya pendataan dan survey kelayakan sanitasi
- d) Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah
- e) Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
- f) Masyarakat lebih mementingkan pembangunan sarana dan prasarana lainnya dibanding pmbangunan sarana dan prasarana Sanitasi
- g) Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

Dari identifikasi terhadap masalah yang ditemukan, maka dirumuskan beberapa alternatif solusi antara lain:

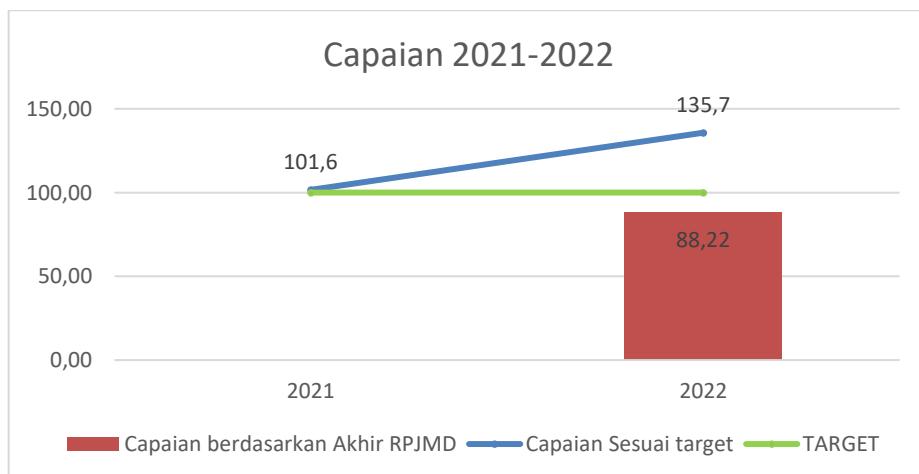
- a) Melakukan jadwal ulang Perencanaan sesuai kondisi alam
- b) Kondisi (cuaca) yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan, perlu penyesuaian terhadap masa pelaksanaan pekerjaan
- c) Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koodinasi antar sektor

- d) Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey sanitasi
- e) Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah
- f) Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
- g) Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

3.2.1.2 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan BerkelaJutan

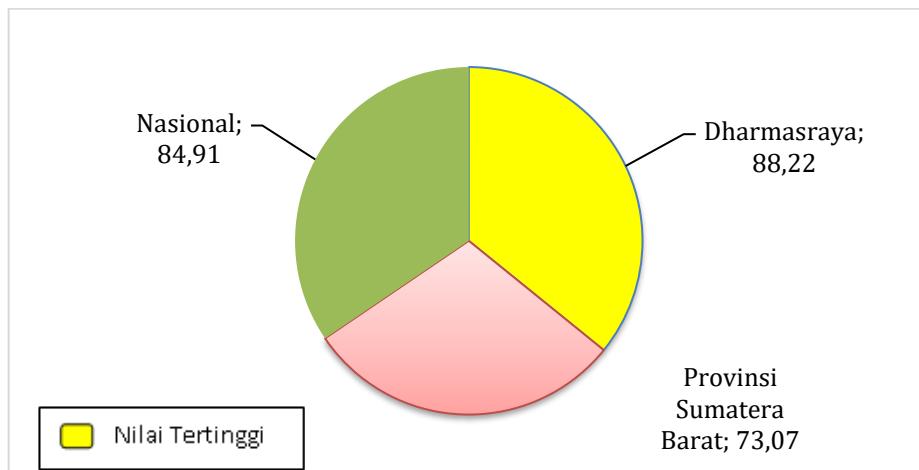
Target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan adalah 65% dan terealisasi 88,22% dengan capaian kinerja 135,72%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 88,2%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 3 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan BerkelaJutan Tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak berkelanjutan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target namun, masih jauh dari target akhir RPJMD tahun 2026. Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 4 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelaanjutan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Kabupaten Dharmasraya sudah diatas angka Provinsi Sumatera dan Nasional, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Faktor pendukung meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber daya air minum layak adalah dengan meningkatnya layanan penyediaan air minum, di Kabupaten Dharmasraya Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum. Capaian layanan air minum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14 Capaian Layanan Air Minum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	IX KOTO	SILAGO	578	42	317	219
		BANAI	866	0	344	522
		KOTO NAN IV DIBAWUAH	710	305	284	121
		LUBUK KARAK	322	97	98	127
2	PULAU PUNJUNG	IV KOTO PULAU PUNJUNG	2287	84	1900	303
		SUNGAI DAREH	1767	234	1350	183
		TEBING TINGGI	206	49	150	7
		SIKABAU	2444	375	2069	0
		SEI. KAMBUT	2199	0	1954	245
		GUNUNG SELASIH	1361	112	952	297
3	SITIUNG	GUNUNG MEDAN	1366	70	1255	41
		SUNGAI DUO	1786	614	961	211
		SIGUNTUR	1404	367	980	57

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	REALISASI		
				TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
		SITIUNG	2033	636	1065	332
4	TIMPEH	RANAH PALABI	437	425	12	0
		PANYUBARANGAN	836	490	346	0
		TABEK	1227	804	402	21
		TARATAK TINGGI	1315	665	460	190
		TIMPEH	219	218	1	0
5	PADANG LAWEH	MUARO SOPAN	180	135	45	0
		SOPAN JAYA	397	301	96	0
		BATU RIJAL	459	146	306	7
		PADANG LAWEH	284	139	106	39
6	KOTO BARU	KOTO BARU	3725	138	3352	235
		SIALANG GAUNG	1795	227	1516	52
		AMPANG KURANJI	1114	0	986	128
		KOTO PADANG	5436	194	4729	461
7	TIUMANG	SIPANGKUR	717	623	56	38
		TIUMANG	1078	755	312	11
		SUNGAI LANGKOK	690	642	16	32
		KOTO BERINGIN	503	311	70	122
8	KOTO SALAK	AMPALU	839	143	486	210
		SIMALIDU	716	279	322	115
		PULAU MAINAN	1114	717	335	62
		KOTO SALAK	995	296	653	46
		PADUKUAN	965	691	326	0
9	SUNGAI RUMBIAI	SUNGAI RUMBIAI TIMUR	1227	511	663	53
		KURNIA KOTO SALAK	1117	768	226	123
		KURNIA SELATAN	2065	1810	189	66
		SUNGAI RUMBIAI	1497	510	845	142
10	KOTO BESAR	KOTO RANAH	972	735	237	10
		KOTO GADANG	1169	203	856	100
		KOTO TINGGI	769	482	281	6
		KOTO LAWEH	885	0	617	268
		ABAI SIAT	1227	0	932	295
		BONJOL	527	31	115	381
		KOTO BESAR	213	0	37	176
11	ASAM JUJUHAN	TANJUNG ALAM	200	0	40	160
		SINAMAR	791	55	489	247
		ALAHAN NAN TIGO	744	0	528	216
		SUNGAI LIMAU	426	0	255	171
		LUBUK BESAR	327	84	196	47
	Total *)	Total *)	Total *)	16513	35118	6895

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

Permasalahan yang terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum antara lain :

- a) Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koordinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPEDA sebagai coordinator
- b) Belum adanya pendataan dan survey kelayakan air minum dan sanitasi
- c) Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
- d) Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap air minum dan penggunaan Tanki septic sesuai teknis
- e) Masyarakat lebih mementingkan pembangunan sarana dan prasarana lainnya dibanding pembangunan sarana dan prasarana Air Minum
- f) Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola Air Minum berbasis masyarakat

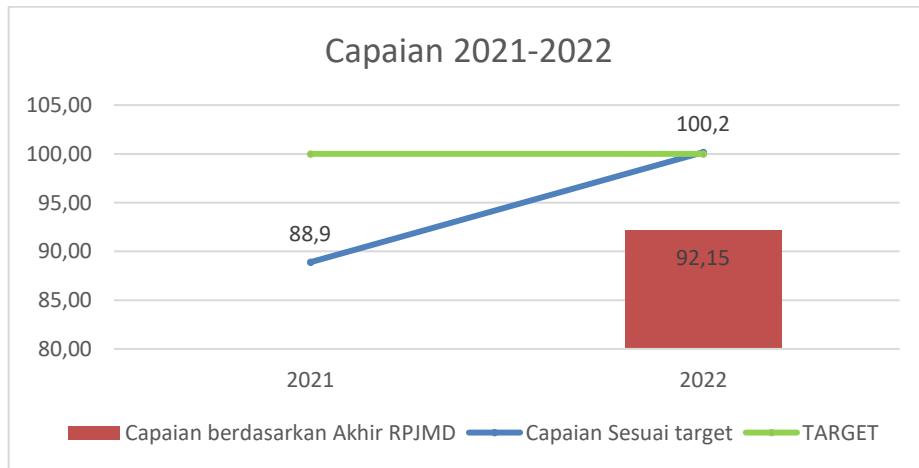
Dari identifikasi terhadap masalah yang ditemukan, maka dirumuskan beberapa alternatif solusi antara lain:

- a) Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koordinasi antar sektor
- b) Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey kelayakan air minum
- c) Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
- d) Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap air minum
- e) Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat

3.2.1.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan BerkelaJutan.

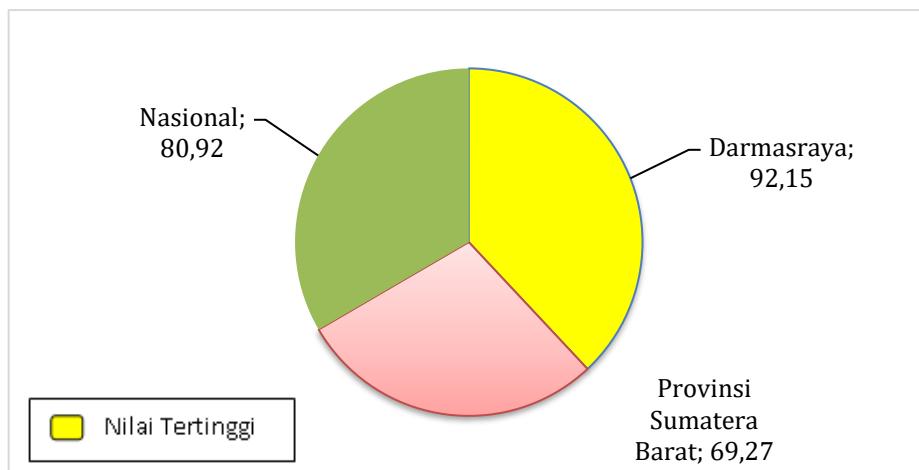
Target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan adalah adalah 92% dan terealisasi 92,15% dengan capaian kinerja 100,17%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 92,15%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 5 Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelaanjutan Tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target namun, masih belum mencapai target akhir RPJMD tahun 2026. Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 6 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelaanjutan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Kabuptaen Dharmasraya sudah melebihi realisasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestic Pada indikator kinerja Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik pada Tahun 2022 dengan target 89 % terealisasi sebesar 92,15% dengan capaian 103,54%, hal yang telah dilakukan untuk mencapai ini adalah:

- a) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- b) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- c) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- d) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- e) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestic dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 15 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	DESA	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX KOTO	IX KOTO	SILAGO	330	0	248	0	0	578
		BANAI	572	0	294	0	0	866
		KOTO NAN IV DIBAWUAH	448	0	262	0	0	710
		LUBUK KARAK	282	0	40	0	0	322
PULAU PUNJUNG	PULAU PUNJUNG	IV KOTO PULAU PUNJUNG	16	0	2071	200	0	2287
		SUNGAI DAREH	34	0	1446	287	0	1767
		TEBING TINGGI	14	0	139	53	0	206
		SIKABAU	266	0	1947	231	0	2444
		SUNGAI KAMBUT	120	0	1918	161	0	2199
		GUNUNG SELASIH	53	0	1250	58	0	1361
SITIUNG	SITIUNG	GUNUNG MEDAN	47	0	1261	58	0	1366
		SUNGAI DUO	0	0	1655	131	0	1786
		SIGUNTUR	27	0	1302	75	0	1404
		SITIUNG	673	0	1035	325	0	2033

NO.	KECAMATAN	DESA	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TIMPEH	TIMPEH	RANAH PALABI	7	39	333	58	0	437
		PANYUBARANGAN	7	148	625	56	0	836
		TABEK	0	72	979	176	0	1227
		TARATAK TINGGI	0	93	1133	89	0	1315
		TIMPEH	2	21	193	3	0	219
PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	MUARO SOPAN	0	0	170	10	0	180
		SOPAN JAYA	0	6	342	49	0	397
		BATU RIJAL	0	113	320	26	0	459
		PADANG LAWEH	0	0	259	25	0	284
KOTO BARU	KOTO BARU	KOTO BARU	49	7	3669	0	0	3725
		SIALANG GAUNG	4	0	1791	0	0	1795
		AMPANG KURANJI	17	22	1075	0	0	1114
		KOTO PADANG	0	56	5380	0	0	5436
TIUMANG	TIUMANG	SIPANGKUR	0	35	470	0	212	717
		TIUMANG	0	11	915	0	152	1078
		SUNGAI LANGKOK	0	11	393	19	267	690
		KOTO BERINGIN	0	91	401	11	0	503
KOTO SALAK	KOTO SALAK	AMPALU	13	0	826	0	0	839
		SIMALIDU	16	6	638	0	56	716
		PULAU MAINAN	35	19	1060	0	0	1114
		KOTO SALAK	65	59	871	0	0	995
		PADUKUAN	23	8	780	50	104	965
SUNGAI RUMBIAI	SUNGAI RUMBIAI	SUNGAI RUMBIAI TIMUR	11	0	1204	12	0	1227
		KURNIA KOTO SALAK	19	0	864	130	104	1117
		KURNIA SELATAN	107	121	1640	197	0	2065
		SUNGAI RUMBIAI	8	0	1467	22	0	1497
KOTO BESAR	KOTO BESAR	KOTO RANAH	0	68	904	0	0	972
		KOTO GADANG	78	0	1091	0	0	1169
		KOTO TINGGI	12	17	740	0	0	769

NO.	KECAMATAN	DESA	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KOTO LAWEH	0	60	825	0	0	885
		ABAI SIAT	64	0	1163	0	0	1227
		BONJOL	146	0	381	0	0	527
		KOTO BESAR	48	0	165	0	0	213
	ASAM JUJUHAN	TANJUNG ALAM	13	0	187	0	0	200
		SINAMAR	140	0	651	0	0	791
		ALAHAN NAN TIGO	344	247	153	0	0	744
		SUNGAI LIMAU	220	0	206	0	0	426
		LUBUK BESAR	262	0	65	0	0	327
Total *)			4592	1330	49197	2512	895	58.526

2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

Permasalahan yang ditemukan dalam mencapai kinerja Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan antara lain :

- a. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi air limbah POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koordinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPEDA sebagai coordinator
- b. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan sanitasi
- c. Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah
- d. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
- e. Masyarakat lebih mementingkan pembangunan sarana dan prasarana lainnya dibanding pmbangunan sarana dan prasarana Sanitasi
- f. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

Dari identifikasi terhadap masalah yang ditemukan, maka dirumuskan beberapa alternatif solusi antara lain

- a. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koordinasi antar sektor
- b. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey sanitasi
- c. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Limbah

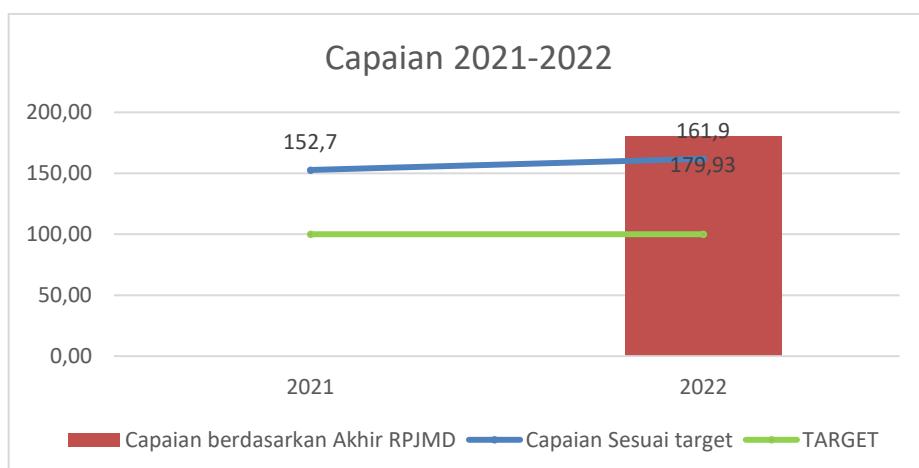
- d. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap penggunaan Tanki septic sesuai teknis
- e. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat

3.2.2 Meningkatnya Kualitas Perumahan Serta Prasarana dan Sarana Pada Kawasan Pemukiman

3.2.2.1 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

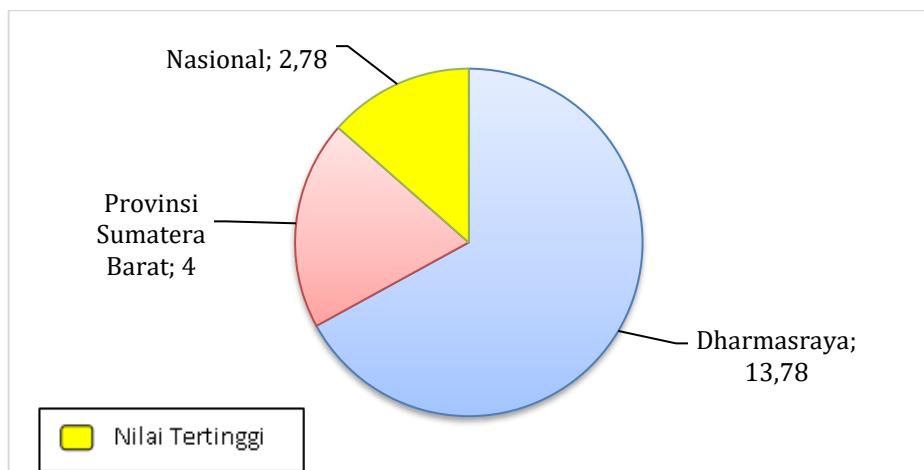
Target persentase lingkungan permukiman kumuh adalah 36,14% dan terealisasi 13,78% dengan capaian kinerja 101,91%, artinya pemukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya sudah jauh berkurang dari pada yang ditargetkan di dalam perjanjian kinerja 2022 maupun didalam RPJMD target tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 179%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 7 Capaian Persentase lingkungan permukiman kumuh tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian Persentase lingkungan permukiman kumuh mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target namun, artinya, setiap tahun jumlah pemukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya semakin menurun, jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi persentase lingkungan permukiman kumuh tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 8 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya masih melebihi Provinsi Sumatera Barat, bahkan Nasional, sehingga masih program dan kegiatan yang memberikan dampak jelas terhadap penurunan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya ,Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Total pemukiman di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 58.526 unit dan luas pemukiman kumuh sebanyak 7.995 unit, atau sebanyak 13,66%, capaian tersebut didukung oleh pencapaian jumlah pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dengan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.

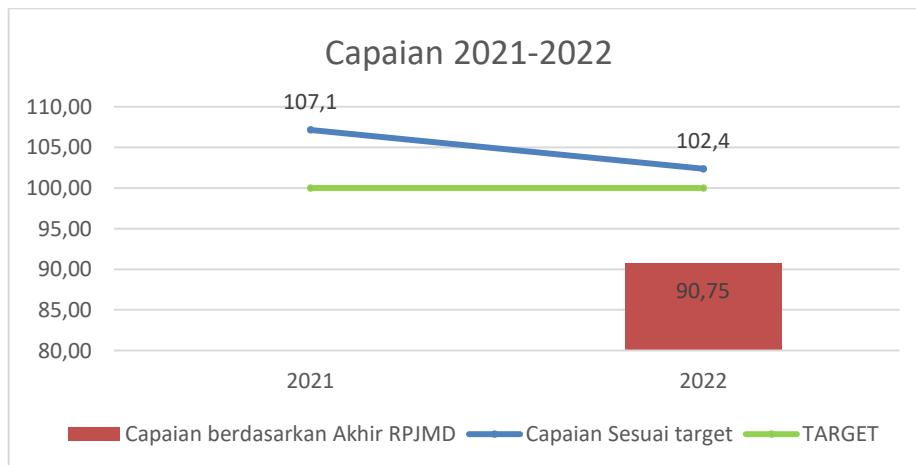
2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

- Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- Pemenuhan dan perawatan prasarana perumahan seperti system drainase di Kawasan pemukiman sehingga mengurangi Kawasan kotor di sekitar perumahan

3.2.2.2 Rasio Pemukiman Layak Huni

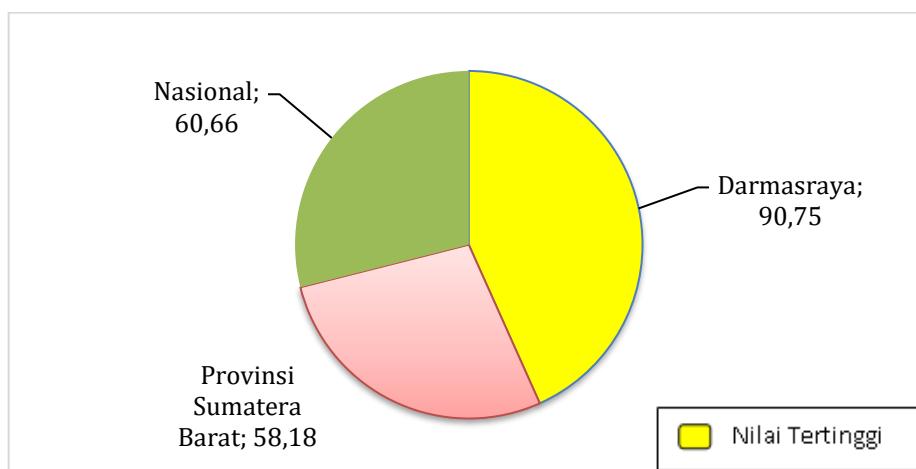
Target rasio pemukiman layak huni adalah 88,65% dan terealisasi dengan capaian kinerja 102,4%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 90,75%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 9 Capaian Rasio pemukiman layak huni tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian rasio pemukiman layak huni mengalami penurunan dari tahun 2021 namun tetap melebihi target yang telah ditentukan, jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi rasio pemukiman layak huni Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 10 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio pemukiman layak huni Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pemukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya telah melebihi rasio pemukiman layak huni Provinsi Sumatera Barat bahkan nasional, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Total pemukiman di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebanyak 58.526 unit dan luas pemukiman layak huni sebanyak 50.531 unit, atau sebanyak 86,34%, capaian tersebut didukung oleh beberapa pencapaian antara lain:

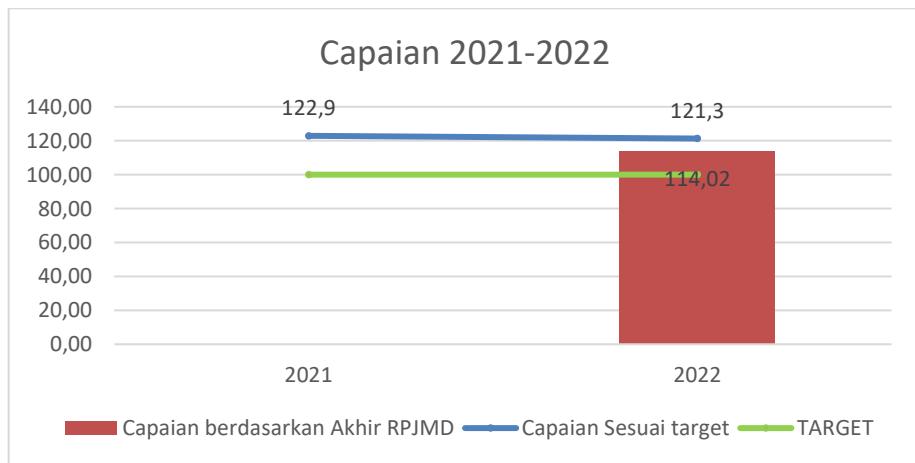
- d. Cakupan pemukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya sudah mencapai 86,34% dari seluruh wilayah hunian yang ada.
 - e. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sudah mencapai 91,98% dari jumlah keseluruhan rumah yang ada di Kabupaten Dharmasraya
 - f. Untuk mengurangi resiko penduduk yang kehilangan hunian karena bencana, Kabupaten Dharmasraya sudah menargetkan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana, dan ditahun 2022 serah terima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebanyak untuk 2 unit.
 - g. Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) sudah mencapai 96,43%
2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja
- a. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian
 - b. Pembangunan rumah susun dengan sewa murah yang sesuai dengan standar minimal Kesehatan, saat ini sudah ada 1 rumah susun di Kabupaten Dharmasraya yang terletak di Kecamatan Pulau Punjung dengan rentang biaya sewa antara Rp.200.000- Rp.400.000

3.2.3 Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air

3.2.3.1 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

Target persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik adalah 69,1% dan terealisasi 83,81% dengan capaian kinerja 121,3%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 114%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 11 Capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2022 telah melebihi target di akhir masa RPJMD, sehingga perlu meningkatkan target kinerja di tahun selanjutnya, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah agraris dimana mata pencarian utama masyarakatnya adalah sector pertanian, sehingga aliran irigasi merupakan komponen terpenting untuk kelancaran pertanian di Dharmasraya, jumlah daerah irigasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2022

Jumlah daerah irigasi sesuai Permen 14/15 sebanyak 2.317 Hektar, dan Sawah/Fungsional (Pemetaan IGT) 2.205 hektar, dan rata-rata jaringan irigasi dalam kondisi baik sebanyak 73,6%, rincian jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat dilihat pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya tahun 2022

2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

Permasalahan yang ditemukan dalam mencapai target kinerja ini adalah Tinggi nya curah hujan pada saat pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dijadwalkan. Dari identifikasi masalah yang didapatkan, dirumuskan alternatif solusi antara lain:

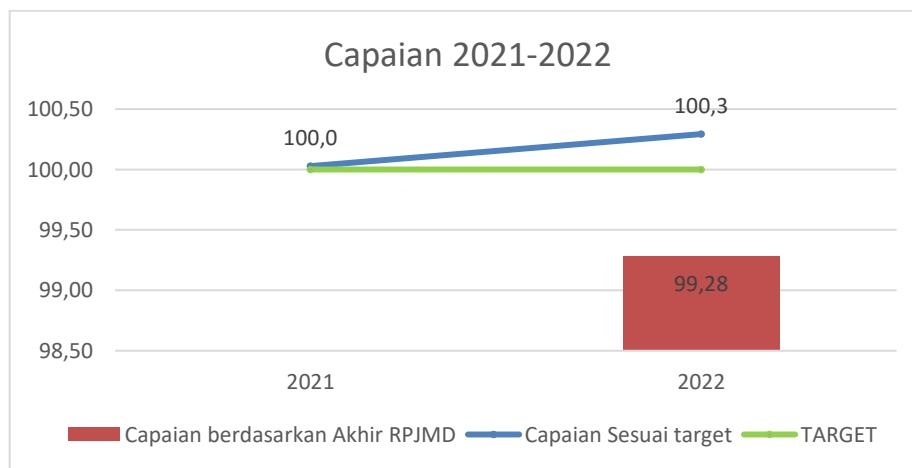
- Melakukan jadwal ulang Perencanaan sesuai kondisi alam
- Kondisi (cuaca) yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan, perlu penyesuaian terhadap masa pelaksanaan pekerjaan
- Maintenance* terhadap saluran irigasi yang telah tersedia

3.2.4 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

3.2.4.1 Angka Harapan Hidup

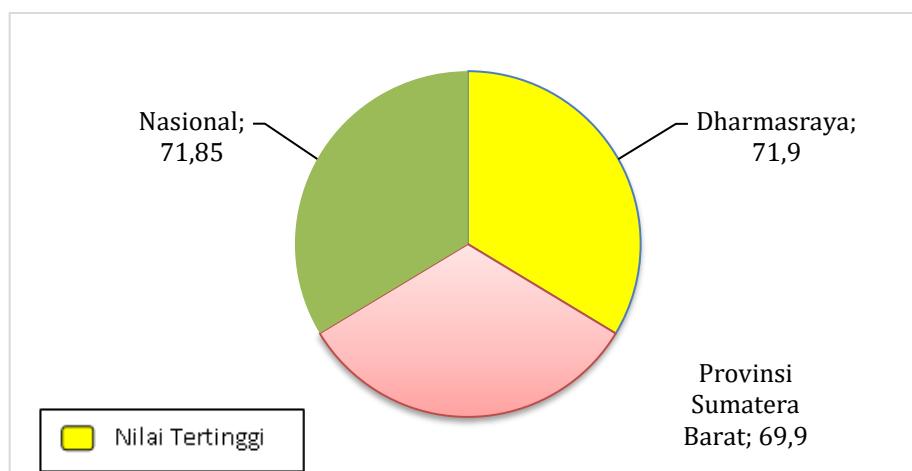
Target angka harapan hidup adalah 71,9 dan terealisasi 71,9 dengan capaian kinerja 100,3%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 99,28%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 12 Capaian Angka Harapan Hidup tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian angka harapan hidup mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target yang ditetapkan, namun belum mencapai target akhir RPJMD tahun 2026. Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi angka harapan hidup dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 13 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari pada angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat, bahkan Nasional, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

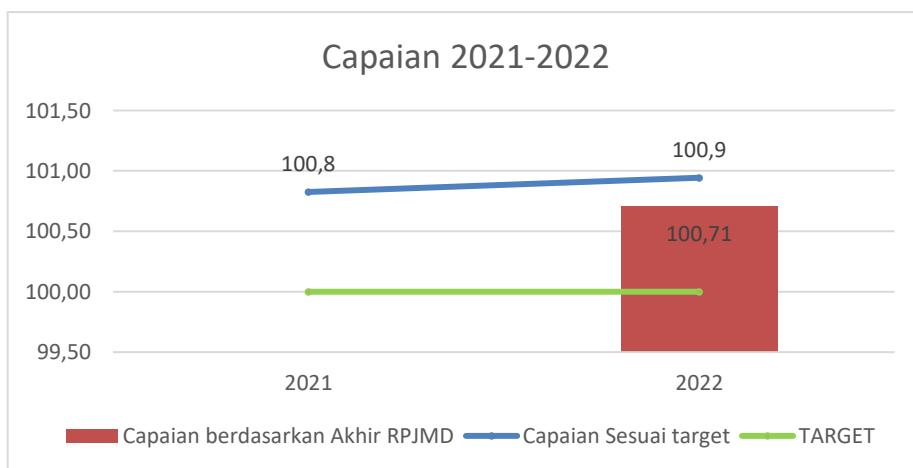
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
 - b) Meningkatkan Pemasyarakatan Olah Raga Dan Prestasi Olahraga
 - c) Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan
 - d) Meningkatkan Pramuka Dalam Masyarakat
 - e) Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
 - f) Meningkatnya Mutu Dan Akses Pelayanan Kesehatan

3.2.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

3.2.5.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

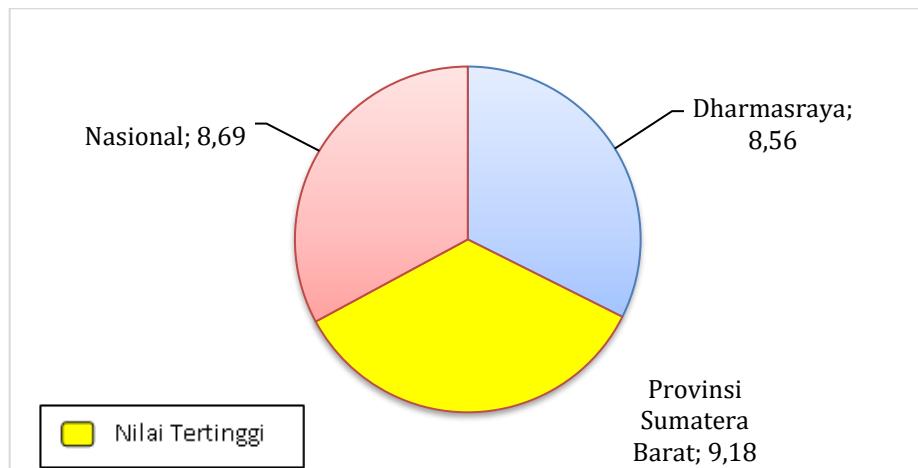
Target angka rata-rata lama sekolah adalah 8,48 dan terealisasi 8,56 dengan capaian kinerja 100,94%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 100,7%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 14 Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target yang ditetapkan, Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi angka rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 15 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



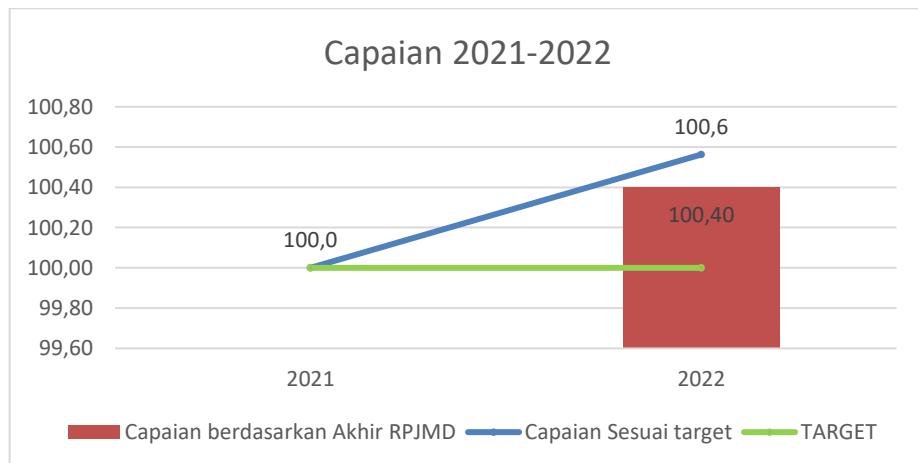
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Dharmasraya paling rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - g) Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Penduduk Usia Sekolah
 - h) Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

3.2.5.2 Harapan Lama Sekolah

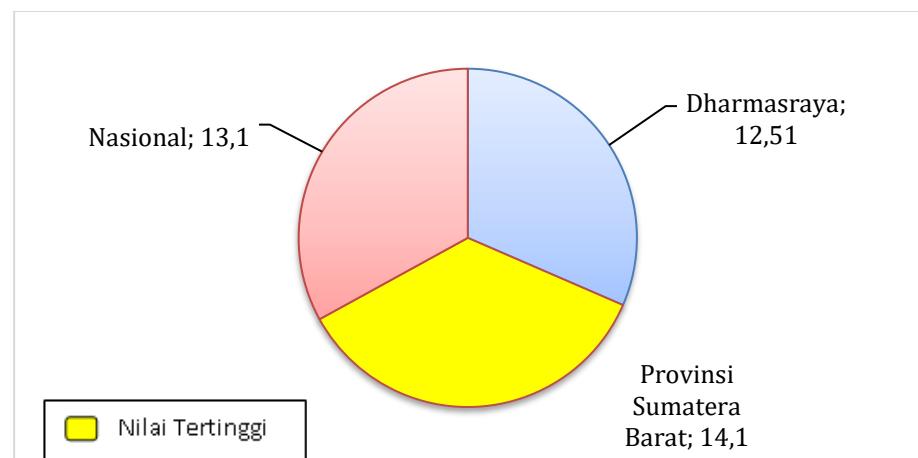
Target harapan lama sekolah tahun 2022 adalah 12,44 dan terealisasi 12,51 dengan capaian kinerja 100,6%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 100,4%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 16 Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi harapan lama sekolah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 17 Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya paling rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional. Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

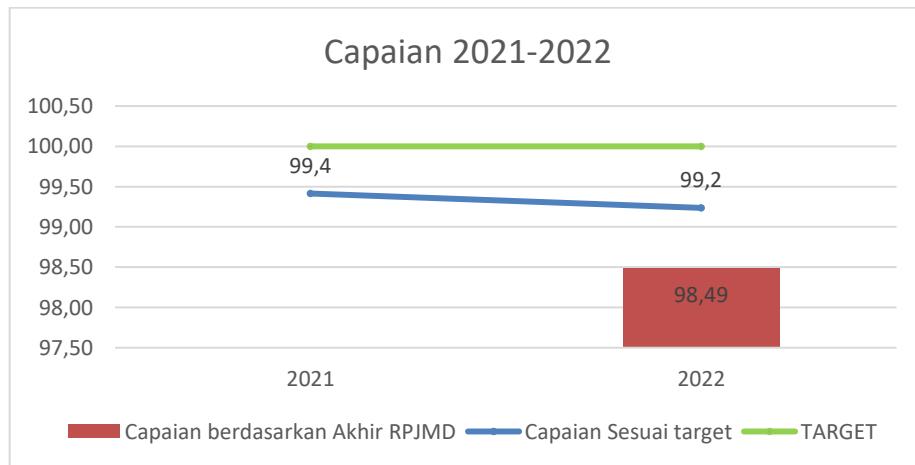
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
 - b) Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Yang Handal, Komprehensif dan Terpadu

3.2.6 Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

3.2.6.1 Indeks Pembangunan Gender

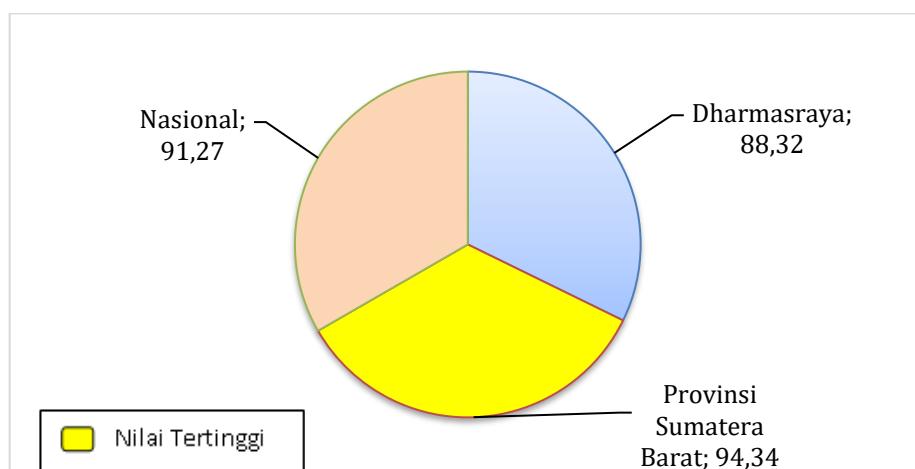
Target indeks pembangunan gender adalah 89 dan terealisasi 88,32 dengan capaian kinerja 99,2%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 98,5%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 18 Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian indeks pembangunan gender mengalami penurunan dari tahun 2021, Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi indeks pembangunan gender dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 19 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan gender Kabupaten Dharmasraya masih jauh dibawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

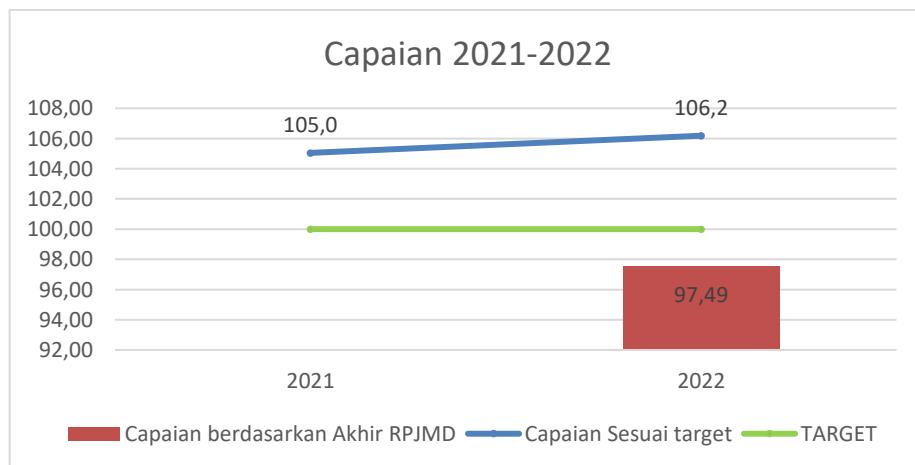
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - b) Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak

3.2.7 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Daya Saing Daerah

3.2.7.1 PDRB Per Kapita

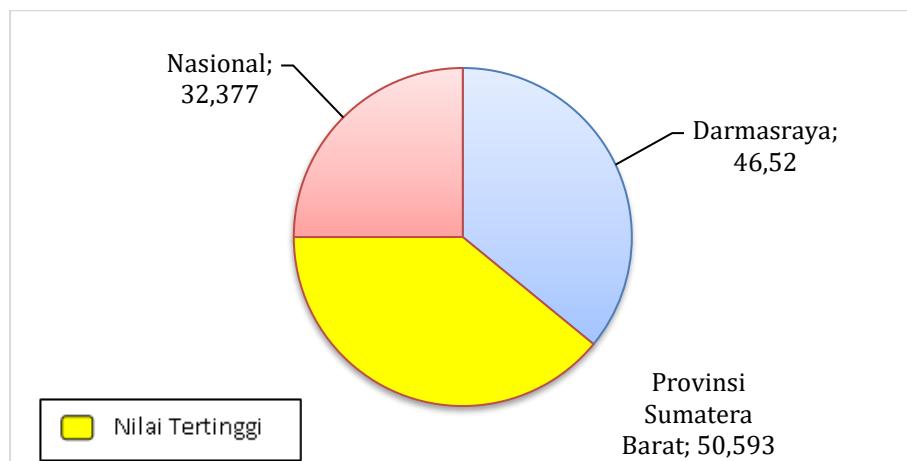
Target PDRB per kapita adalah 43,81 juta rupiah dan terealisasi 46,52 juta rupiah dengan capaian kinerja 106,2%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 97,49%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 20 Capaian PDRB Per Kapita tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian PDRB per Kapita mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah melebihi target yang ditetapkan, namun belum mencapai target akhir masa RPJMD tahun 2026 Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi PDRB Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 21 Perbandingan Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



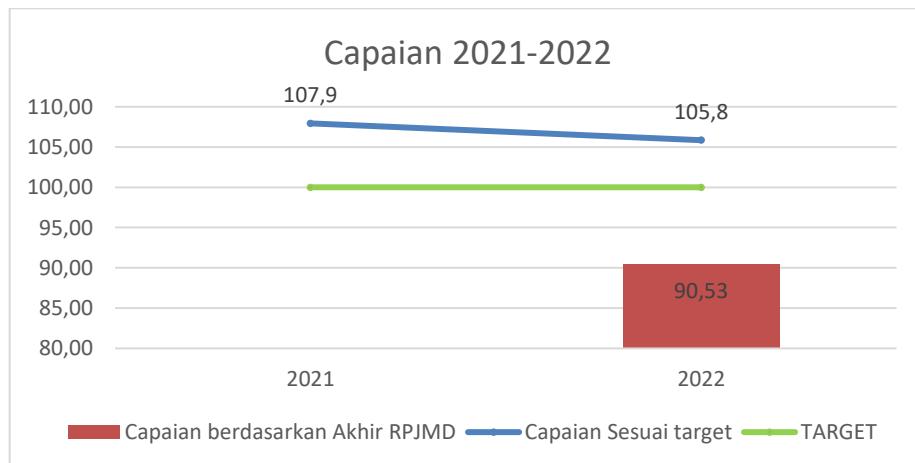
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Domestic Regional Bruto per kapita Kabupaten Dharmasraya melebihi Nasional, namun masih dibawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM
 - b) Mewujudkan IKM Yang Menghasilkan Nilai Tambah dan Manfaat bagi Perekonomian Masyarakat.
 - c) Meningkatnya Ketersediaan Pangan
 - d) Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan
 - e) Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang Asuh

3.2.7.2 Rasio Net Ekspor terhadap PDRB

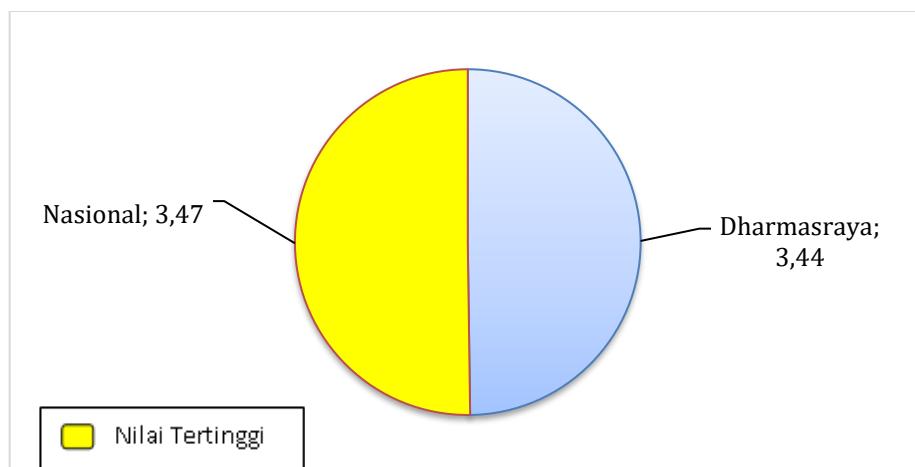
Target rasio net ekspor terhadap PDRB adalah 43,81 juta rupiah dan terealisasi 46,52 juta rupiah dengan capaian kinerja 106,2%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 97,49%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 22 Capaian Indikator Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Rasio net ekspor terhadap PDRB sudah mencapai target, namun mengalami penurunan dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan pencapaian Nasional, realisasi rasio net ekspor terhadap PDRB dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 23 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio net ekspor terhadap PDRB Nasional tidak jauh beda dari capaian Kabupaten Dharmasraya. Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

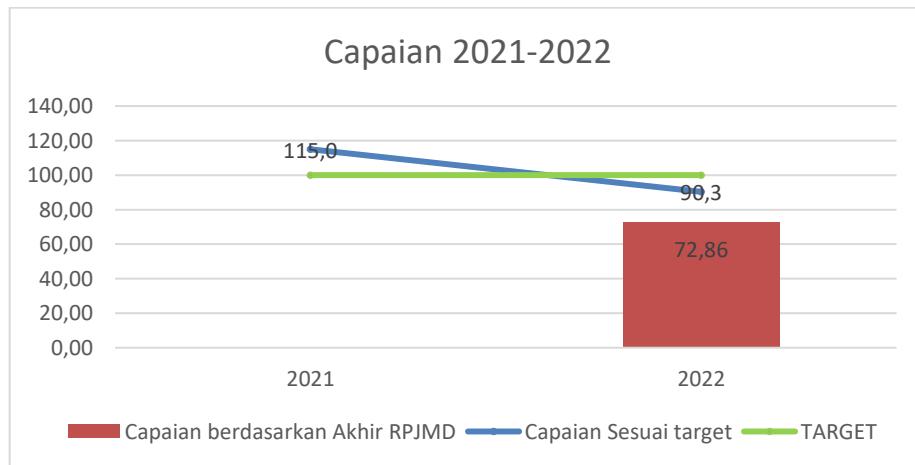
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
 - b) Meningkatkan aktifitas perdagangan dan perlindungan konsumen
 - c) Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat.

3.2.8 Mengurangi Pengangguran

3.2.8.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

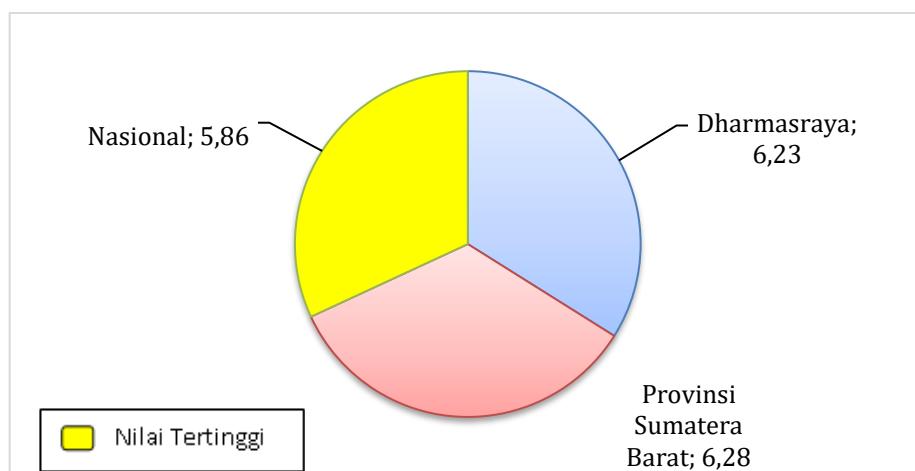
Target tingkat pengangguran terbuka adalah 5,65 dan terealisasi 6,23 dengan capaian kinerja 93%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini baru mencapai 72,86%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 24 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka (TPT) belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan mengalami penurunan dari tahun 2021, Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 25 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Dharmasraya sudah berada diatas Provinsi Sumatera Barat, namun, masih jauh di bawah capaian Nasional,Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

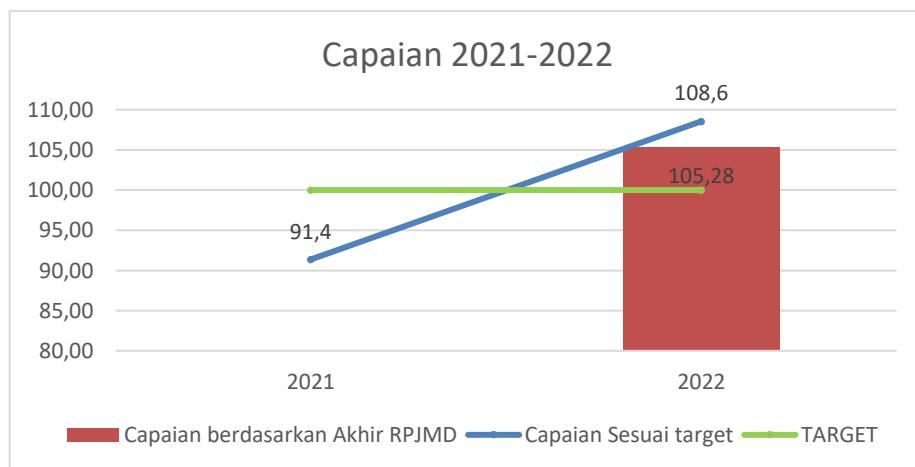
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
 - b) Terwujudnya Kesempatan Kerja
 - c) Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Peningkatan Perlindungan Hak-Hak Dasar Pekerja/Buruh
 - d) Meningkatkan Kualitas Daya Tarik Wisata Dan Industri Pariwisata Yang Inovatif

3.2.9 Mengurangi Kemiskinan

3.2.9.1 Tingkat Kemiskinan

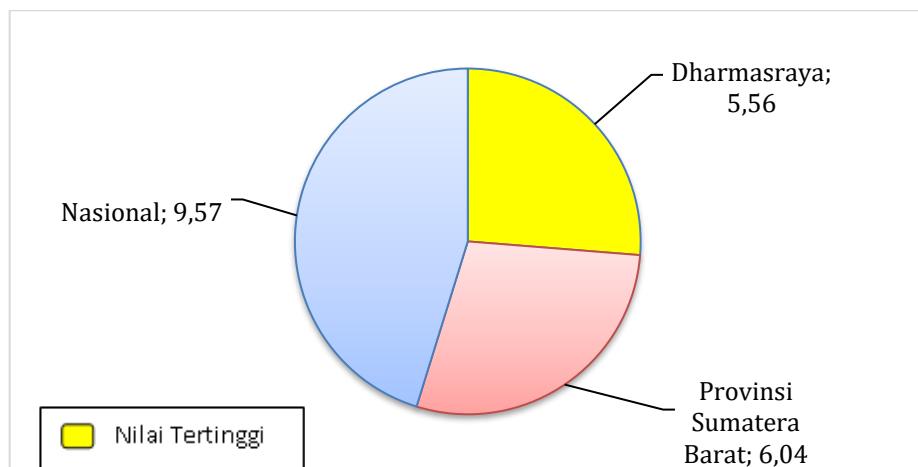
Target tingkat kemiskinan adalah 6,08% dan terealisasi 5,56% dengan capaian kinerja 108,6%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 105,28% sehingga perlu meningkatkan target yang akan ditetapkan di tahun 2023, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 26 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian tingkat kemiskinan sudah melebihi target, dan mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2021, Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 27 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya paling baik dibandingkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat bahkan Nasional, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

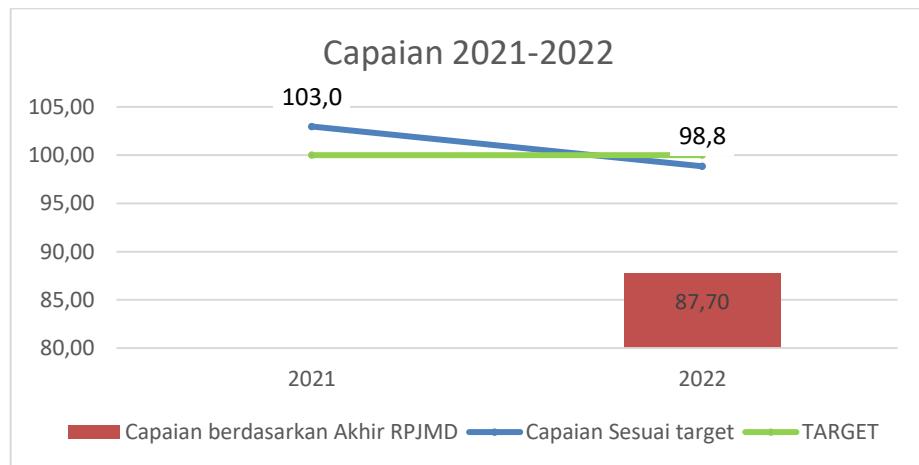
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Pemanfaatan Pangan
 - b) Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial
 - c) Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial dan Korban Bencana
2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

3.2.10 Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

3.2.10.1 Indeks Perilaku Antikorupsi

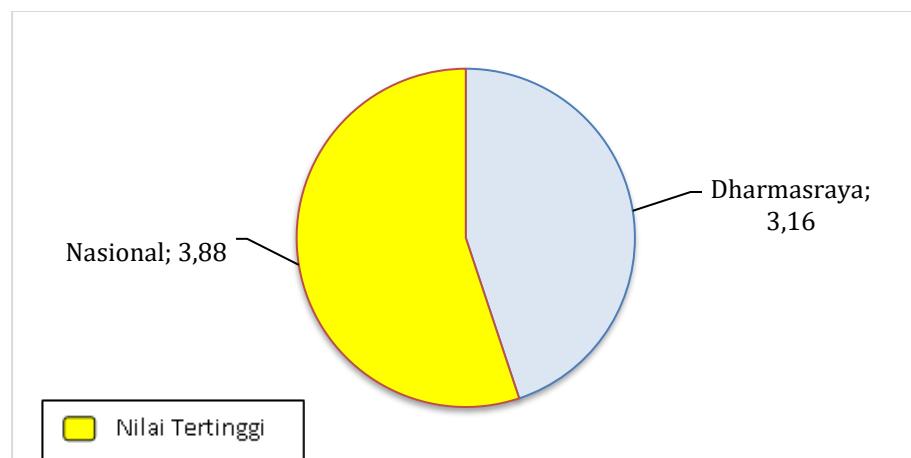
Target indeks perilaku antikorupsi adalah 3,194 dan terealisasi 3,16 dengan capaian kinerja 98,85%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 87,7%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 28 Capaian Indikator Indeks Perilaku Anti korupsi tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian indeks perilaku anti korupsi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan mengalami penurunan dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan pencapaian Nasional, realisasi indeks perilaku anti korupsi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 29 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



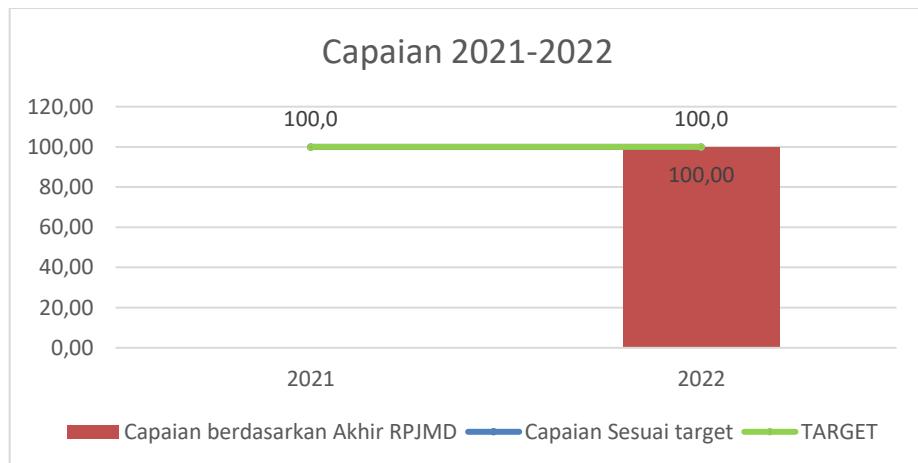
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks perilaku anti korupsi Kabupaten Dharmasraya masih dibawah Nasional. Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c) Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetisi SDM APIP

3.2.10.2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Target Opini BPK terhadap laporan keuangan adalah WTP dan berhasil mencapai WTP dengan capaian kinerja 100%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 100%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 30 Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



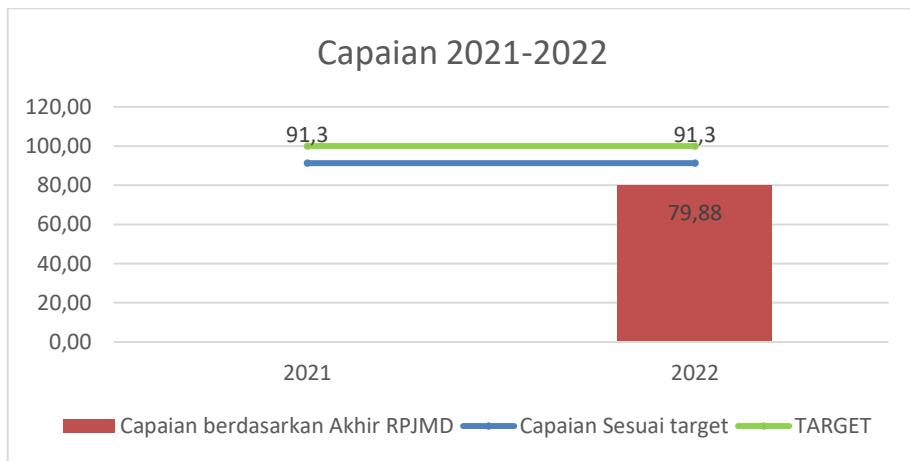
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah dicapai sesuai dengan yang diharapkan, dan pencapaian ini harus dipertahankan ditahun selanjutnya, saat ini, Kabupaten Dharmasraya sudah mendapatkan prediket WTP 8 Tahun berturut-turut, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Penerapan System Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
 - b) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - c) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.10.3 Hasil Evaluasi AKIP

Target hasil evaluasi AKIP adalah BB dan terealisasi B dengan capaian kinerja 91,3%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini baru mencapai 79,88%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 31 Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian hasil evaluasi AKIP Kabupaten Dharmasraya belum mencapai target yang ditetapkan, dan masih jauh dari target kinerja yang ditargetkan dimasa akhir RPJMD, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

- a) Capaian 4 Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Ditahun 2022, nilai AKIP Kabupaten Dharmasraya mengalami sedikit peningkatan dari nilai 63,98 menjadi 64,07 peningkatannya hanya 0,09 poin, beberapa komponen pelaporan kinerja yang dinilai oleh Kementerian PAN RB antara lain sebagai berikut:

- i. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
- ii. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
- iii. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Dari ketiga komponen diatas, kelemahan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Dharmasraya yang telah disusun adalah sub penilaian ke-3 atau laporan kinerja yang telah disusun tidak memberikan dampak dalam penyesuaian strategi, dan LAKIP belum menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun selanjutnya,

Dari nilai maksimal komponen pelaporan 15 poin, poin pelaporan kinerja memberikan dampak terhadap penyesuaian strategi sebesar 7,5 poin, sehingga, walaupun pemenuhan dokumen sudah sangat baik, tetapi saat tidak ada dampak yang nyata terhadap pelaporan kinerja, maka nilai kinerja akan tetap tidak mencapai hasil yang diharapkan

Selain itu, laporan kinerja yang telah disusun sebelumnya belum dipublikasikan dan belum diinformalkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangan

Dari segi penganggaran, terdapat refocusing anggaran Sekretariat Daerah yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Dharmasraya pasca pandemic *Covid-19* sehingga peningkatan kapasitas ASN serta tim SAKIP tidak dapat terlaksana secara maksimal

b) Nilai AKIP OPD yang dinilai oleh Inspektorat

Capaian kinerja Nilai AKIP OPD mendapatkan nilai diatas B, artinya nilai system akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang mendapatkan nilai besar sama dengan 70 poin, penilaian terhadap penerapan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan oleh inspektorat, hasil penilaian di tuangkan dalam laporan inspektorat nomor : LAP- 01 s/d LAP-38 /Ev/Inspektorat-2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

20 OPD yang mendapatkan nilai sama atau besar dari nilai 70 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 16 Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP diatas B

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	76,87
2	Dinas Kesehatan	75,85
3	Badan Keuangan Daerah	74,65
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73,86
5	RSUD Sungai Dareh	73,43
6	Kecamatan Sungai Rumbai	72,62
7	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	72,57
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	72,12
9	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	71,57
10	Inspektorat	71,57
11	Kecamatan Pulau Punjung	71,53
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	71,51
13	Kecamatan Timpeh	71,41
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	70,55

15	Kecamatan Asam Jujuhan	70,53
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	70,46
17	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	70,30
18	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga	70,28
19	Dinas Pendidikan	70,09
20	Dinas Lingkungan Hidup	70,05

Dari target yang telah ditetapkan, masih ada 1 OPD lagi yang seharusnya mendapatkan nilai diatas 70, namun hal ini tidak tercapai karena terdapat refocusing anggaran untuk pemulihan Kabupaten Dharmasraya pasca Covid-19, meskipun tidak mencapai 100%, tapi capaian kinerja nilai AKIP OPD diatas B sudah masuk kedalam kategori berhasil, keberhasilan ini didukung dengan beberapa kegiatan selama tahun 2022 antara lain, pembentukan tim evaluasi internal SAKIP perangkat daerah melalui surat Sekretaris Daerah No 130.4/787/org/2022 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP dan RB, yang dibentuk oleh masing-masing OPD dan dibimbing langsung oleh Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharamasraya

Dari 38 OPD,masing-masing sudah seluruh OPD memiliki tim evaluasi kinerja internal, tim penyusun laporan kinerja, dan tim implementasi SAKIP perangkat daerah, dan dari tim yang telah dibentuk, seluruh OPD sudah memiliki Rencana Strategis tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, Rencana Aksi Kinerja tahun 2022, pohon kinerj, cascading dan dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas kinerja lainnya.

2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

Dari Analisa terhadap penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa alternatif solusi yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan antara lain:

- i. *Basic dimension* dalam penerapan SAKIP adalah komitmen pimpinan, dalam rangka peningkatan komitmen pimpinan serta meningkatkan rasa kepemilikan pimpinan OPD terhadap kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun, maka dilaksanakan Penandatanganan komitmen kinerja yang telah ditandatangani oleh seluruh kepala OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk komitmen kepala perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan strategi berdasarkan laporan kinerja tahun sebelumnya.
- ii. Integrasi dari Sekretariat Daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam penggunaan e-SAKIP dharmasraya, pada bulan Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan hak guna pakai aplikasi e-

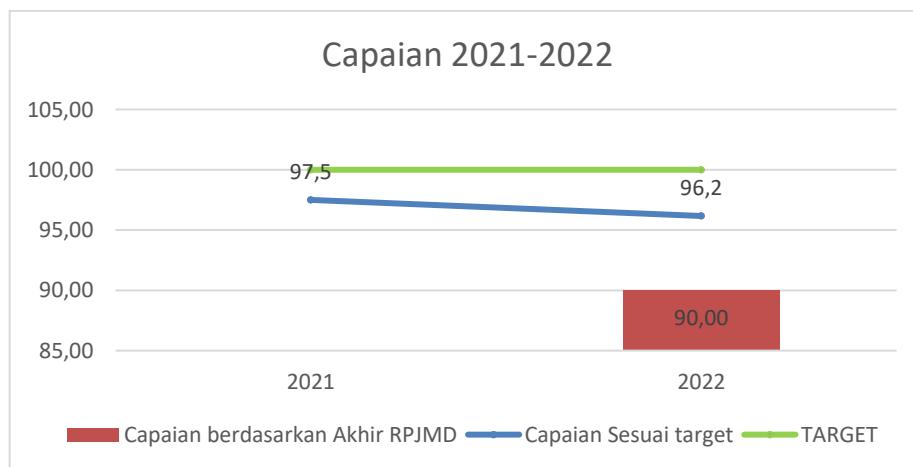
sakip dharmasraya guna meningkatkan nilai publikasi serta pendokumentasián dokumen kinerja.

- iii. Peningkatan kapasitas tim SAKIP kabupaten tidak maksimal, namun, untuk peningkatan motivasi TIM SAKIP tingkat Perangkat Daerah, telah dilaksanakan Lomba Bulan RB dengan 8 cabang lomba dan salah satunya lomba penerapan SAKIP Perangkat Daerah, dari lomba tersebut didapatkan pemenang lomba penerapan SAKIP antara lain (1) Dinsos P3APPKB, (2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (3) Dinas Pertanian.
- iv. Pembentukan dua tim inti dalam percepatan pelaksanaan SAKIP antara lain Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dalam SK Bupati Dharmasraya No 188.45/ /KPTS-BUP/2023 tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022, dimana anggotanya terdiri dari BAPPEDA, INSPEKTORAT dan SEKRETARIAT DAERAH.

3.2.10.4 Nilai LPPD

Target Nilai LPPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah 3,65 dan terealisasi 3,51 dengan capaian kinerja 96,16%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 90%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 32 Capaian Indikator Nilai LPPD tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja Nilai LPPD, dan masih jauh dari target akhir masa RPJMD ,Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Indeks Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bisa dikatakan berhasil karena adanya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja ini kita ketahui hasilnya dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja

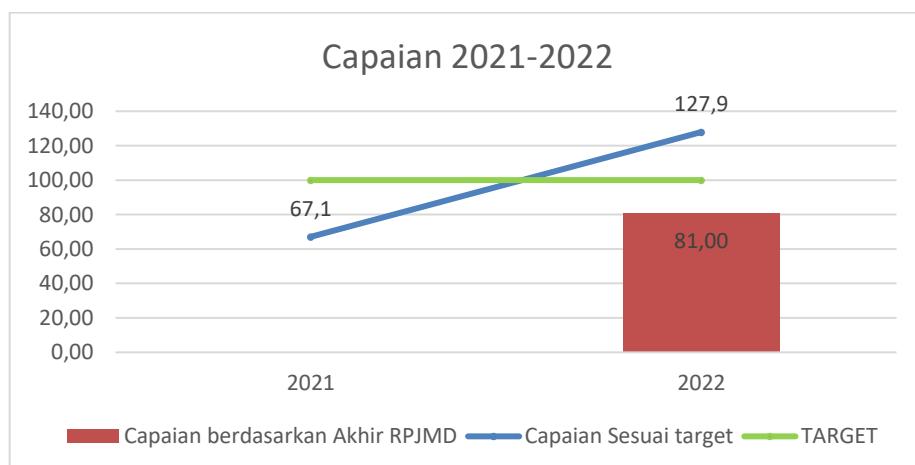
Secara laporan dan evaluasi sudah dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Tetapi kabupaten/kota masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait hasil evaluasi.

3.2.11 Birokrasi yang Berkualitas

3.2.11.1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)

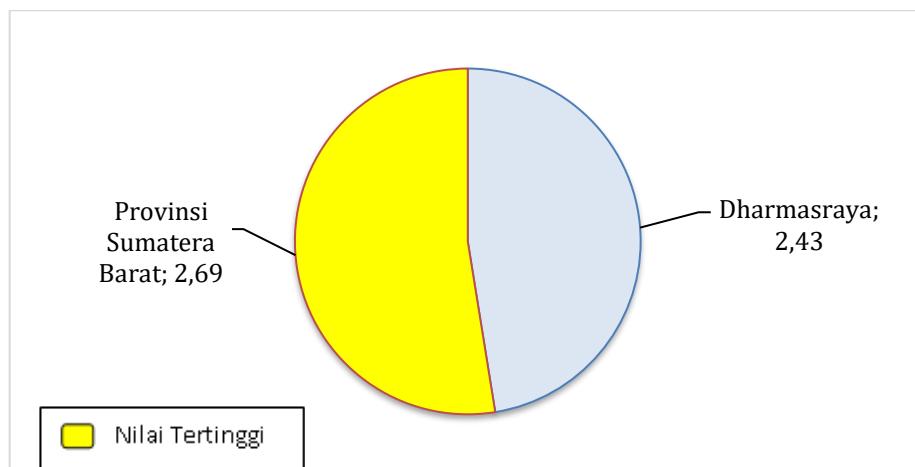
Target Indeks SPBE Dharmasraya tahun 2022 adalah 1,9 dan terealisasi 2,43 dengan capaian kinerja 127%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 81%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 33 Capaian Indikator Indeks SPBE tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian indeks SPBE sudah melebihi target, dan mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2021, Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat, realisasi indeks SPBE dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 34 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



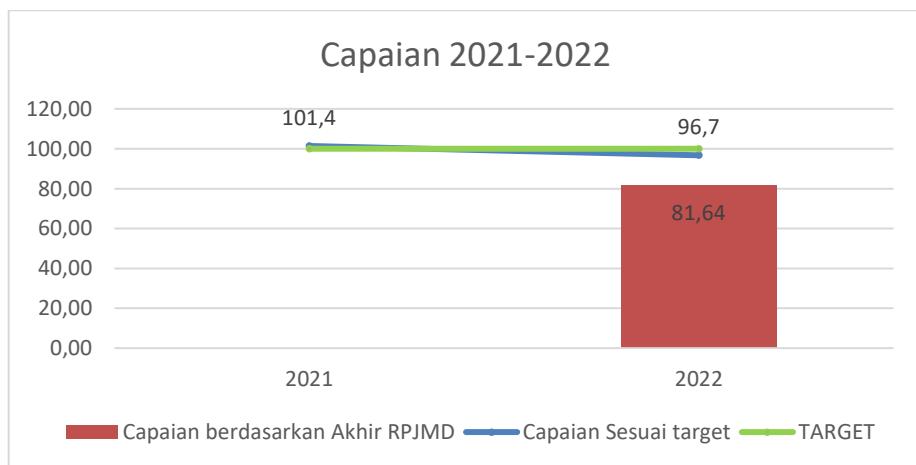
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Sarana Pemerintahan yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi
 - b) Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah
 - c) Meningkatnya Ketersediaan dan Ketepatan Data Statistik Sektoral Untuk Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan
 - d) Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi Dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3.2.11.2 Indeks Profesionalisme ASN

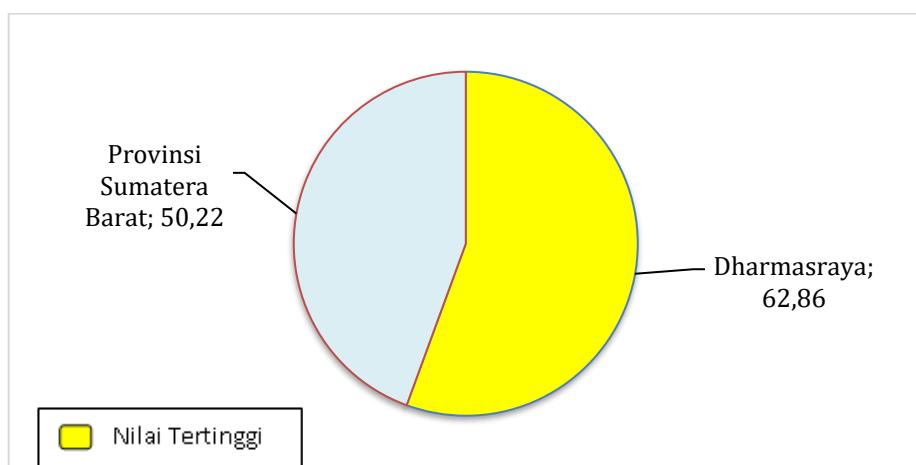
Target indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah 65% dan terealisasi 62,5% dengan capaian kinerja 96,7%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 81,64%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 35 Capaian Indikator Indeks Profesionalisme ASN tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian kinerja indeks profesionalisme ASN belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan mengalami penurunan dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat realisasi indeks profesionalisme ASN Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 36 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks profesionalisme Kabupaten Dharmasraya sudah melebihi capaian Provinsi Sumatera Barat dan mendapat peringkat ke 5 dari Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekan Baru. Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

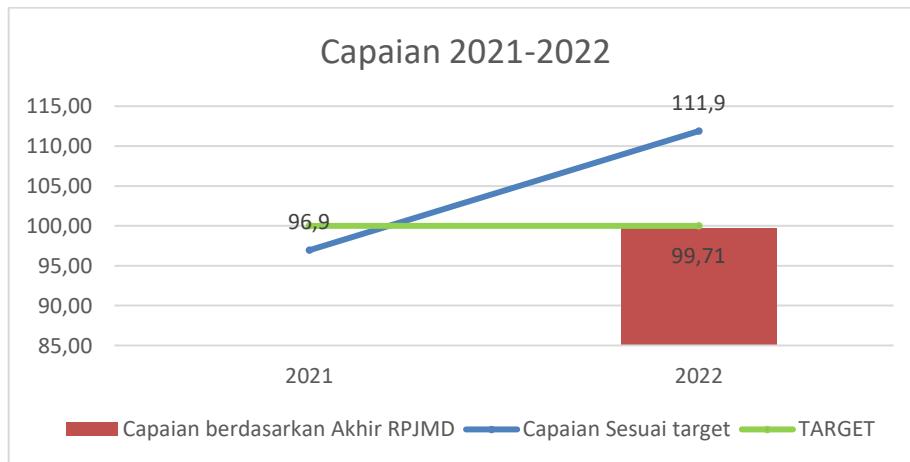
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI ASN
 - b) MENINGKATNYA KINERJA DAN DISIPLIN ASN

3.2.12 Pelayanan Publik yang Prima

3.2.12.1 Publik Service Indeks

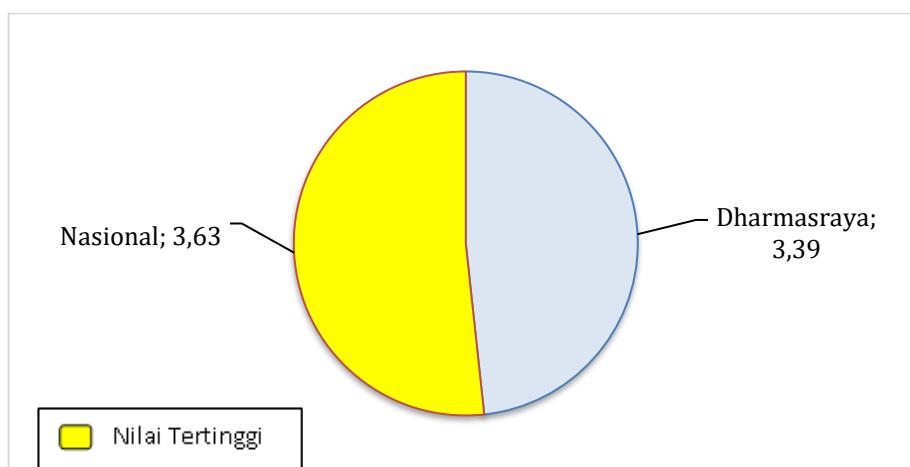
Target tahun 2022 untuk public service indeks adalah 3,03 dan terealisasi 3,39 dengan capaian kinerja 111,8%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 99,71%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 37 Capaian Indikator Publik Service Indeks tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Capaian public service indeks sudah melebihi target, dan mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2021, Jika dibandingkan dengan pencapaian Nasional, realisasi indeks public service Dharamsraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 38 Perbandingan Capaian Kinerja Publik Service Indeks Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa public service indeks Kabupaten Dharmasraya masih dibawah capaian Nasional, sehingga masih perlu pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung

peningkatan public indeks servis Dharmasraya ,Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

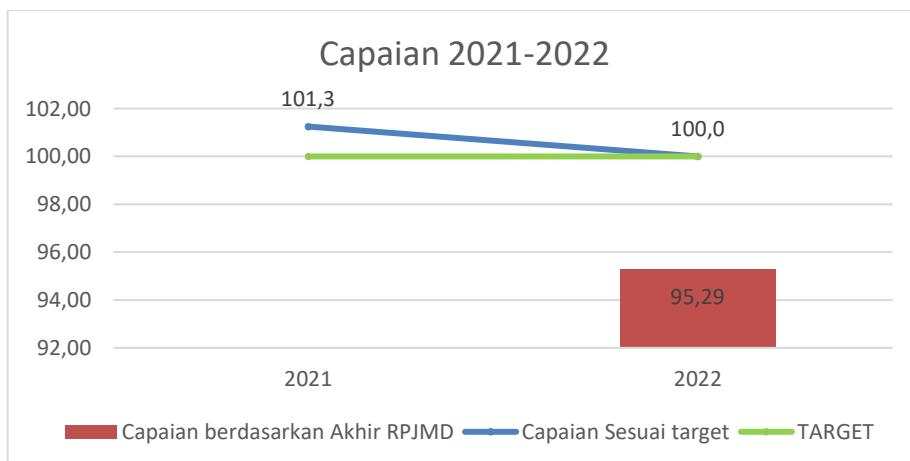
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

- a) Inventarisasi Kepemilikan Tanah Masyarakat dan Pemerintah Daerah
- b) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2.12.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Target indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 adalah 81% dan terealisasi 81% dengan capaian kinerja 100% target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 95,29% perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 39 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

- a) Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik

Target yang ditetapkan tahun 2022 untuk tingkat kepatuhan pelayanan Publik adalah 84, dan telah tercapai 88,67 dengan capaian kinerja sebesar 105,6%, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100,76%, namun jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya masih menduduki posisi ke-4 setelah Pemerintah Kota Payakumbuh (89,45), Pemerintah Kota Padang Panjang (89,25), Pemerintah Kab Solok (88,73), Pemerintah Kab Dharmasraya (88,67).

Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public tahun 2022, kabupaten Dharmasraya mendapatkan nilai 88,67, nilai tersebut adalah hasil penilaian oleh

Ombudsman terhadap 7 Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, hasil penilaian terhadap penilaian Ombudsman tersebut adalah sebagai berikut:

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Puskesmas Sitiung I	18.97	32.37	20.69	16.99	89.02
2	Dinas Kesehatan	18.52	30.51	20.65	18.93	88.61
3	Dinas Sosial	20.28	31.03	20.28	19.34	90.93
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.98	32.37	20.89	19.34	93.58
5	Puskesmas Koto Baru	17.1	31.86	19.64	18	86.6
6	Dinas Pendidikan	17.98	30.28	20	18.12	86.38
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.7	31.03	18.94	18.93	85.58
Nilai Akhir dan Zona					88,67	
Kategori					A	
Opini					Kualitas Tinggi	

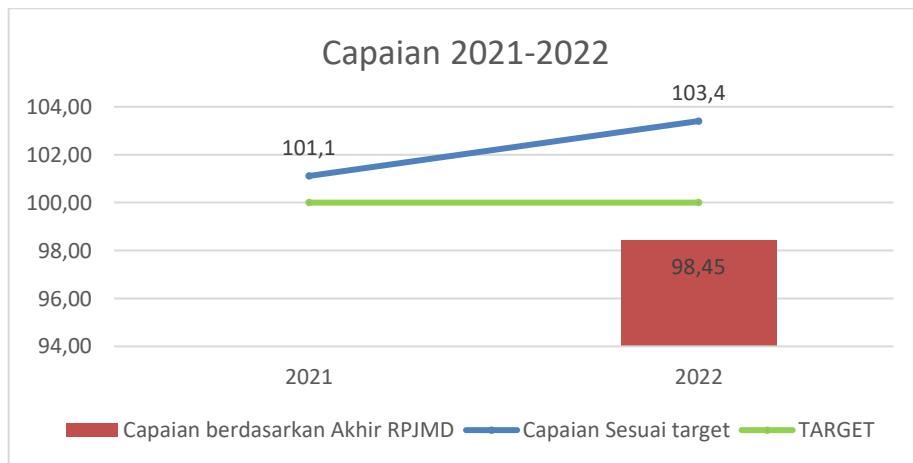
- b) Pelayanan Prima kepada masyarakat

3.2.13 Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Nagari

3.2.13.1 Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial

Target untuk tahun 2022 rata-rata indeks ketahanan sosial adalah 0,819 dan terealisasi 0,85 dengan capaian kinerja 103,4% target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 98,45%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 40 Capaian Indikator Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



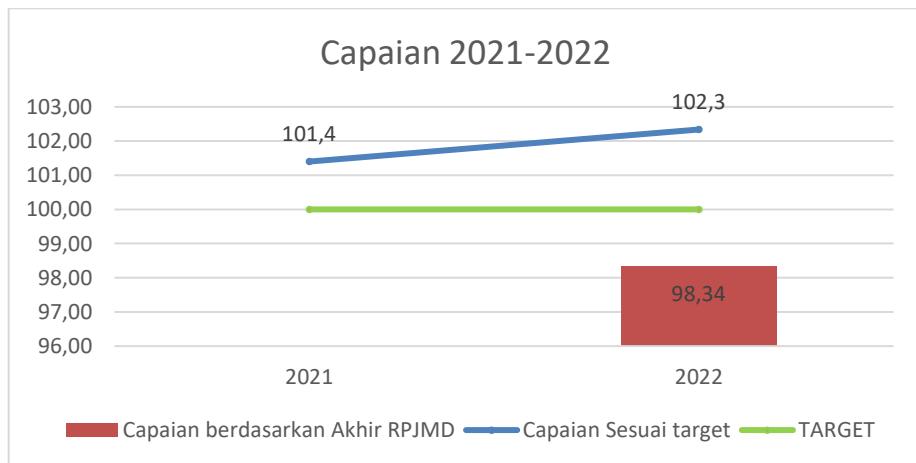
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata indeks ketahanan social meningkat dari tahun 2021, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan diakhir masa RPJMD, sehingga masih dibutuhkan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Modal Sosial
 - d) Permukiman

3.2.13.2 Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi

Target untuk tahun 2022 rata-rata indeks ketahanan ekonomi adalah 0,7056 dan terealisasi 0,72 dengan capaian kinerja 102,3%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 98,34%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 41 Capaian Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



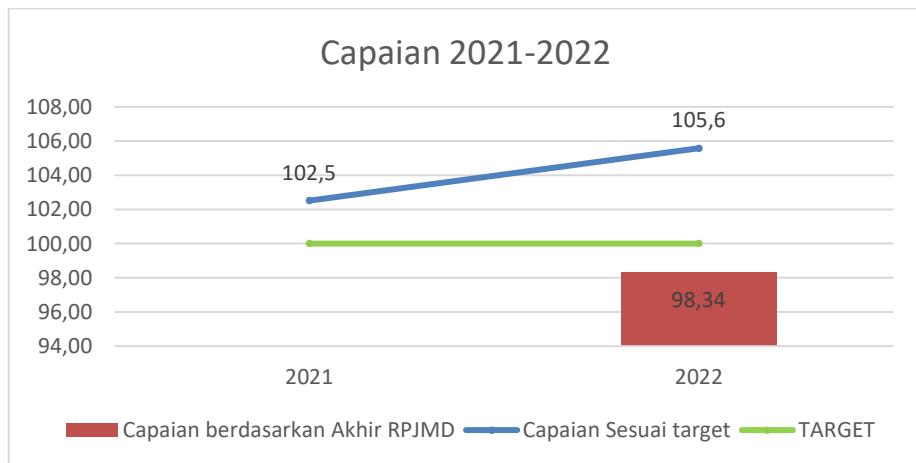
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata indeks ketahanan ekonomi meningkat dari tahun 2021, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan diakhir masa RPJMD, sehingga masih dibutuhkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Keragaman Produksi Masyarakat
 - b) Akses Pusat Perdagangan dan Pasar
 - c) Akses Logistik
 - d) Akses Perbankan dan Kredit
 - e) Keterbukaan Wilayah

3.2.13.3 Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan

Target untuk tahun 2022 rata-rata indeks ketahanan ekologi/ lingkungan adalah 0,595 dan terealisasi 0,63 dengan capaian kinerja 105,6%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 101,45%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 42 Capaian Indikator Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata indeks ketahanan ekologi/lingkungan meningkat dari tahun 2021, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan diakhir masa RPJMD, sehingga masih dibutuhkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

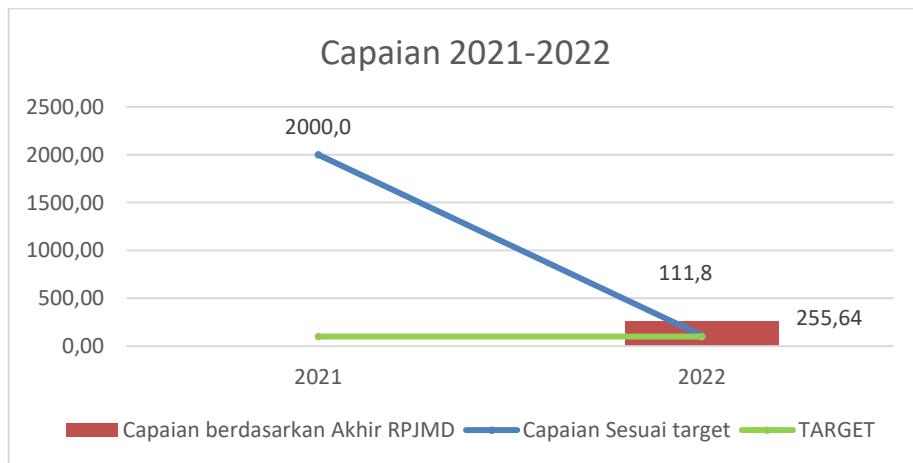
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Kualitas Lingkungan
 - b) Bencana Alam
 - c) Tanggap Bencana

3.2.14 Optimalisasi Perencanaan Tata Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

3.2.14.1 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Target kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2022 adalah 10%, namun, pada semester pertama tahun 2022, kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi 60%, sehingga dilakukan perubahan target kinerja dari 10% menjadi 80% dan terealisasi 89,47% dengan capaian kinerja 111,8%, jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022, capaian kinerja ini mencapai 894,7%, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 255%, sehingga perlu dilakukan perubahan target kinerja agar mencapai pemerintahan yang efektif, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 43 Capaian Indikator Kese tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan target dari tahun 2021 dari segi persentase, mengalami penurunan, namun, dari segi capaian, terjadi peningkatan capaian kinerja, dan target telah tercapai hingga akhir masa RPJMD, sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap target yang telah ditetapkan, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

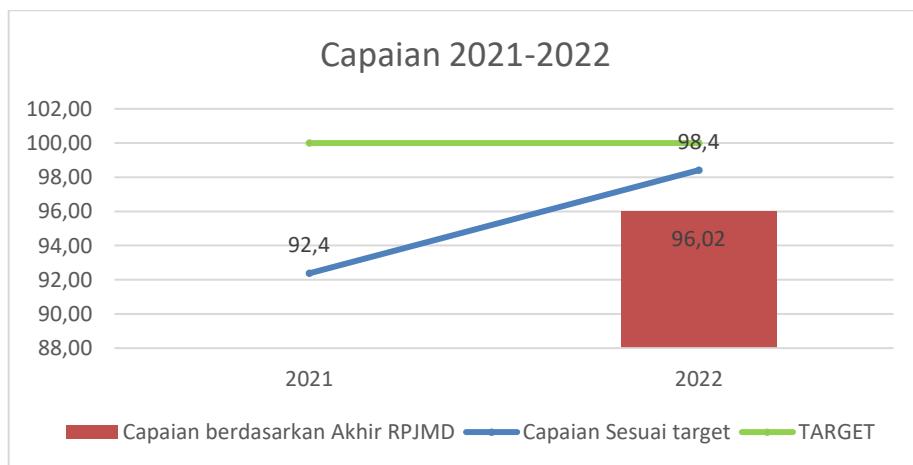
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

3.2.15 Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

3.2.15.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

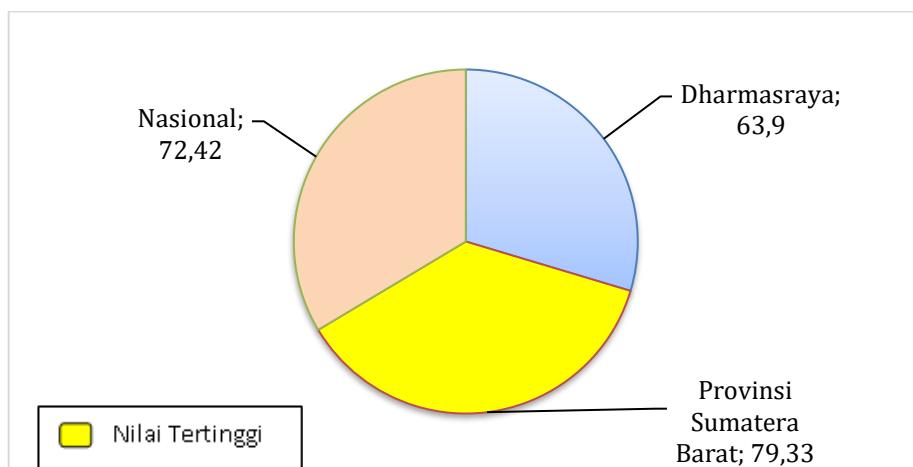
Target indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 adalah 64,93% dan terealisasi 63,9% dengan capaian kinerja 98,4%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini baru mencapai 96%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 44 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 45 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks kualitas Kabupaten Dharmasraya berada dibawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, sehingga perlu inovasi yang berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya ,Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

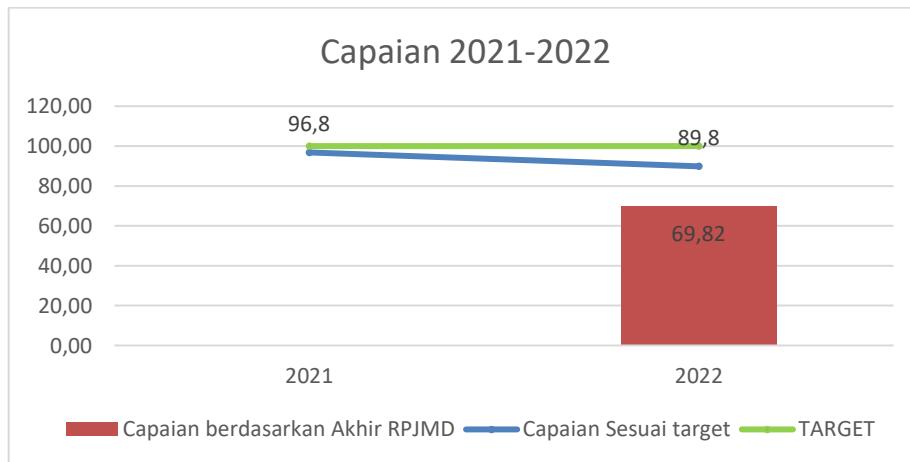
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya indeks kualitas air 53,81%
 - b) Meningkatnya indeks kualitas udara 85,32
 - c) Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan 42,7

3.2.16 Optimalisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

3.2.16.1 Indeks Resiko Bencana Daerah

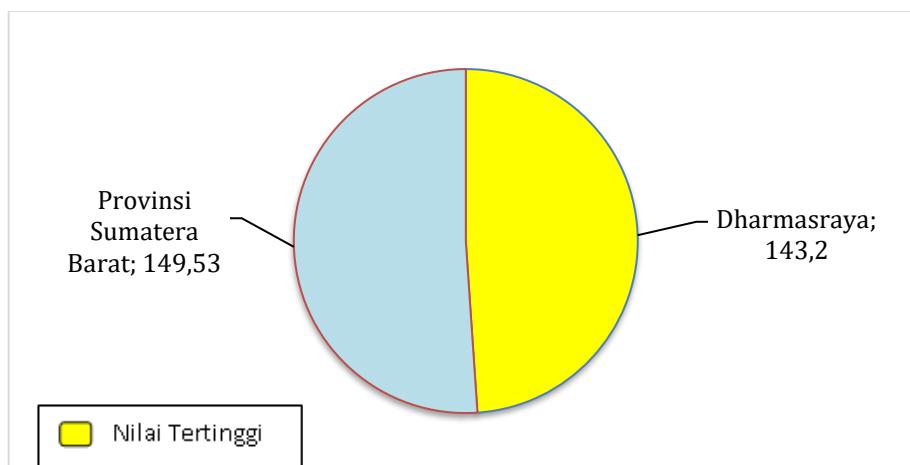
Target indeks resiko bencana daerah tahun 2022 adalah 130 dan terealisasi 143,2 dengan capaian kinerja 89,85%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 68,92%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 46 Capaian Indikator Indeks Resiko Bencana Daerah tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian indeks resiko bencana daerah Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh indeks resiko bencana daerah tahun 2022 masih data sementara, Jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, realisasi indeks resiko bencana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 47 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Indonesia Tahun 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks resiko bencana daerah Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat, artinya Kabupaten Dharmasraya memiliki resiko lebih rendah terhadap terjadinya bencana, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

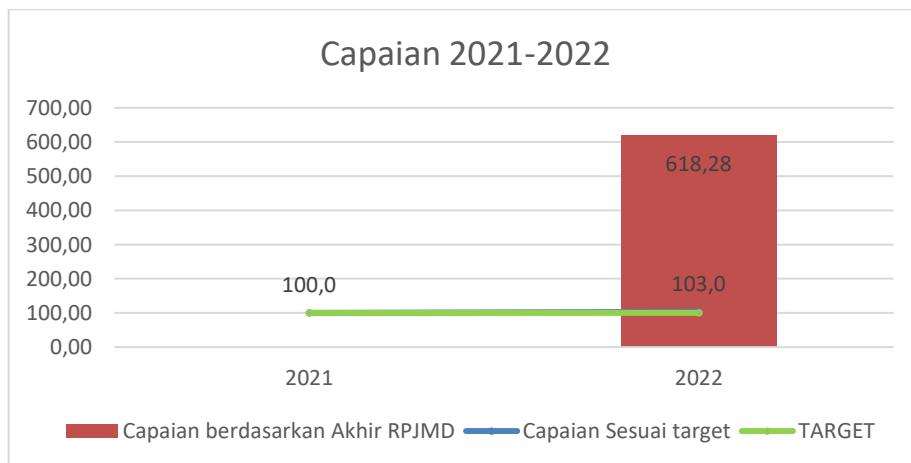
1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Meliputi Tahap Prabencana, Saat Tanggap Darurat, Dan Pasca Bencana
 - b) Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Tanggap Terhadap Kebakaran

3.2.17 Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama dalam Kehidupan Masyarakat

3.2.17.1 Persentase Peningkatan Zakat

Target persentase peningkatan zakat tahun 2022 adalah 2%%, namun, pada semester pertama tahun 2022, kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi 60%, sehingga dilakukan perubahan target kinerja dari 2% menjadi 12% dan terealisasi 12,37% dengan capaian kinerja 103%, jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 capaian kinerja ini mencapai 618%, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 618%, sehingga perlu dilakukan perubahan target kinerja agar mencapai pemerintahan yang efektif, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 48 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Zakat tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja peningkatan zakat sudah sesuai target yang ditentukan ,Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

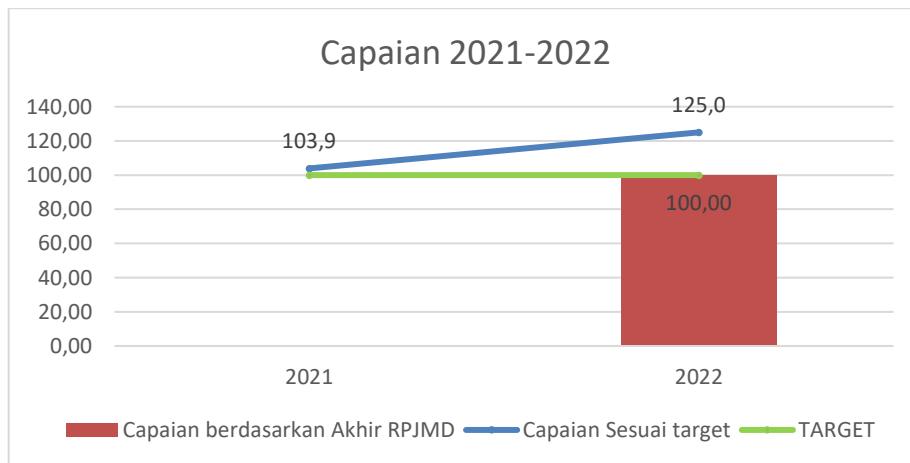
Koordinasi bersama pihak BAZNAS dan bagian Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan cara promosi yang massive dengan memasang baliho dan billboard tentang pentingnya zakat bagi kehidupan beragama, zakat yang disalurkan oleh baznas dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya juga mendapatkan penghargaan sebagai bupati pendukung Gerakan zakat sumbar pada malam anugrah badan amil zakat Nasional Tahun 2022, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan zakat

3.2.17.2 Persentase MDA/TPA/TPSA yang Aktif

Target persentase MDA/TPA/TPSA yang Aktif tahun 2022 adalah 80% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 125%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 100%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 49 Capaian Indikator Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



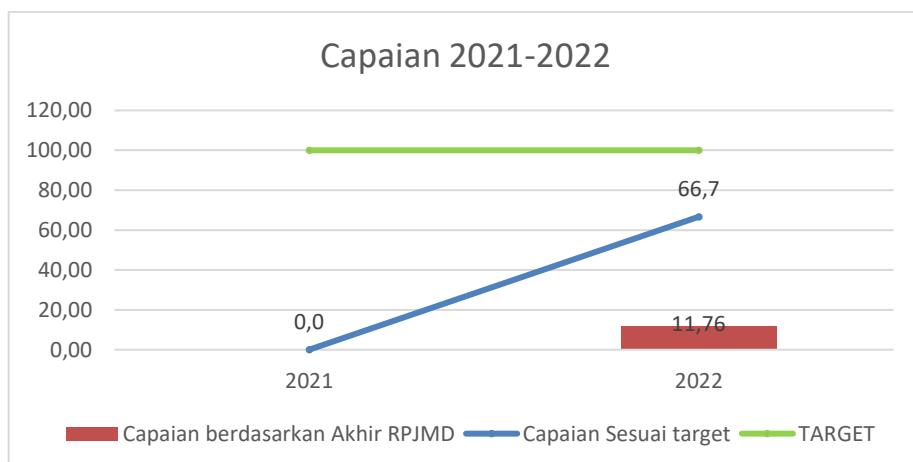
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang Aktif sudah sesuai target yang ditentukan jumlah zakat di tahun 2021 sebanyak Rp.4,653,016,301 ditahun 2022 meningkat menjadi Rp. 5,227,268,269 dengan peningkatan sebesar 125 %.

3.2.18 Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Nilai Nilai Agama, Adat dan Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat

3.2.18.1 Jumlah Nagari Beradat dan Berbudaya

Target jumlah nagari beradat dan berbudaya tahun 2022 adalah 3 nagari dan terealisasi 2 nagari beradat dan berbudaya dengan capaian kinerja 66,7%, target ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD, indikator kinerja ini sudah mencapai 11,76%, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

GRAFIK 50 Capaian Indikator Jumlah Nagari Beradat dan Berbudaya tahun 2021 s/d 2022 dibandingkan capaian tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah nagari beradat dan berbudaya mengalami peningkatan dari tahun 2021, namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian kinerja ini tidak mencapai target sehingga perlu dilakukan inovasi terhadap program dan kegiatan yang berdampak terhadap capaian kinerja ini, Analisa terhadap pencapaian diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
 - a) Meningkatnya Pelestarian Seni Daerah
 - b) Meningkatnya Fungsi Adat dalam Kehidupan Masyarakat
 - c) Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Takbenda
 - d) Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

Tabel 17 Realisasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.465.357.420	3.430.851.150	1
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	169.858.070	90.268.165	1
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.127.765.580	13.872.121.429	3
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	51.621.610.535	47.811.628.055	5
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	308.465.000	306.290.950	1
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	175.301.150	175.131.200	1
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	82.402.230	82.049.830	4
TOTAL PER SASARAN	69.950.759.985	65.768.340.779	16
Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.330.000	1.803.650	1
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12.641.000	9.683.782	1
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	116.854.500	115.427.950	1
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.230.000	1.075.000	1
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	398.630.800	359.578.871	1
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	68.525.400	61.777.146	1
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.064.311.900	4.861.812.258	1
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	4.036.736.960	3.981.640.505	2
TOTAL PER SASARAN	9.703.260.560	9.392.799.161	9
Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air			

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.201.025.820	1.915.768.073	1
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	607.550.000	605.081.250	1
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.257.354.500	9.034.462.060	7
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.347.408.700	2.302.727.003	6
TOTAL PER SASARAN	15.413.339.020	13.858.038.386	15
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	104.996.700	104.318.605	1
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	54.693.200	54.246.300	1
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	28.477.000	28.105.600	1
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	391.657.000	389.560.650	1
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.765.500	50.051.300	1
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.995.100	39.712.000	1
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.239.400	40.815.300	1
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.804.395.280	9.372.808.969	7
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75.799.200	74.926.363	2
Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	249.600.000	249.600.000	1
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	465.750.000	465.480.000	1
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	757.115.000	690.032.700	6
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.401.932.600	1.367.665.075	4

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.699.307.300	1.322.936.542	3
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	597.692.900	591.432.300	1
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.032.250	231.374.800	1
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	602.971.900	580.034.300	1
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	136.869.700	136.318.500	1
TOTAL PER SASARAN	17.746.290.030	15.789.419.304	35
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	23.039.300	23.028.900	1
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.830.000	54.828.000	1
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	38.292.991.266	12.934.914.151	14
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.060.008.987	5.461.159.328	10
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.578.404.398	2.305.665.906	8
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	851.212.000	30.187.250	3
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.415.950	67.473.250	3
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.576.950	16.375.300	2
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	82.968.650	82.496.334	3
TOTAL PER SASARAN	63.028.447.501	20.976.128.419	45
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan			
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	531.680.300	523.941.431	1
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90.205.000	24.462.310	1
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96.363.450	96.260.886	1
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.839.000	125.944.182	1

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	58.211.000	1
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.439.650	150.275.450	2
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115.105.000	114.286.300	2
TOTAL PER SASARAN	1.233.438.400	1.093.381.559	9
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah			
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	13.553.000	13.371.450	1
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	62.728.500	62.482.250	1
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	519.661.300	487.259.200	2
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	174.545.000	158.612.500	1
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36.108.500	36.026.513	1
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	23.463.910	23.221.300	1
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.644.950	19.630.550	1
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	349.143.000	346.957.650	2
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	90.350.915	88.167.329	2
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	863.753.850	825.678.450	2
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	146.565.100	145.068.850	1
Pengembangan Prasarana Pertanian	291.393.950	288.938.413	1
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	361.382.300	360.189.558	1
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	758.942.460	758.585.394	1
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
	404.890.000	391.177.990	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.479.739.250	1.473.228.217	3
Pembangunan Prasarana Pertanian	2.940.524.650	2.923.206.302	2
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	67.968.500	53.750.300	2
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.411.350	50.075.300	1
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	588.994.650	585.693.852	1
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.239.368	74.016.450	2
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	360.216.000	359.998.000	2
TOTAL PER SASARAN	9.678.220.503	9.525.335.818	33
Mengurangi pengangguran			
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	117.615.250	114.139.373	1
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	16.333.500	15.792.850	1
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	15.273.000	14.918.300	1
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.993.350	11.510.000	1
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	15.863.750	15.586.950	1
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110.257.250	109.205.158	1
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	226.641.000	225.708.013	1
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	55.876.750	53.137.900	1
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.007.343.800	992.110.146	4
TOTAL PER SASARAN	1.579.197.650	1.552.108.690	12
Mengurangi kemiskinan			

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	110.899.000	110.331.970	7
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.471.950	57.210.300	3
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	302.723.100	302.677.500	2
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.364.550	113.166.590	1
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.023.600	10.002.900	1
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	51.600.300	51.204.850	2
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	592.589.650	590.947.074	2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.317.600	42.222.650	1
TOTAL PER SASARAN	1.280.989.750	1.277.763.834	19
Birokrasi yang bersih dan akuntabel			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000	234.902.225	1
Fasilitasi Kerjasama Daerah	37.396.270	37.385.355	1
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.078.349.000	1.047.356.922	4
Administrasi Tata Pemerintahan	547.134.000	546.967.865	3
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	157.351.150	157.324.001	3
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	180.976.650	180.820.950	3
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	76.540.900	76.524.203	3
Layanan Administrasi DPRD	179.660.000	151.760.000	1
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.532.243.000	11.250.649.705	1
Pembahasan Kerja Sama Daerah	683.685.000	675.728.750	1
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.477.846.500	7.094.236.627	2
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.510.143.000	2.440.885.915	2
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	18.246.253.000	16.761.049.775	2
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	695.329.000	689.357.675	1

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.744.163.150	1.700.453.800	4
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	438.069.000	420.902.579	2
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	422.775.900	422.289.033	5
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	112.090.871.813	63.543.964.613	2
Pengelolaan Barang Milik Daerah	591.991.500	579.045.691	4
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	756.788.150	752.339.875	4
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.096.900	29.907.050	1
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.669.900	19.253.798	1
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	334.356.000	324.821.300	1
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	514.806.500	506.856.246	2
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	131.632.250	130.665.751	2
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	51.704.650	48.023.668	2
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	705.175.950	676.060.238	2
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	43.207.500	40.492.250	1
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	155.343.600	154.415.865	1
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	729.974.550	721.357.450	7
Pendampingan dan Asistensi	768.997.500	752.068.097	3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	914.975.800	897.348.247	8
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.364.492.704	9.164.654.089	23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.050.524.134	47.510.045.967	124
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.427.010.708	11.045.310.439	107
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.881.501.561	24.290.770.136	43
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	845.502.150	795.259.680	6
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.852.750	92.692.447	11
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	1.650.000	900.000	2

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.860.000	23.470.000	8
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.799.700	30.510.000	16
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.040.000	10.040.000	5
TOTAL PER SASARAN	309.812.741.790	206.028.868.277	425
Birokrasi yang berkualitas			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	110.181.000	110.090.000	1
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.056.200	19.950.000	1
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	19.956.000	19.653.000	1
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.713.667.900	3.629.989.487	7
Pengembangan Kompetensi Teknis	12.643.000	10.526.800	1
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	928.863.100	872.158.222	1
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	386.320.250	382.891.801	5
Mutasi dan Promosi ASN	112.896.600	109.773.300	2
Pengembangan Kompetensi ASN	639.287.350	563.537.315	4
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	176.923.700	175.873.842	3
TOTAL PER SASARAN	6.120.795.100	5.894.443.767	26
Pelayanan publik yang prima			
Peningkatan Pelayanan BLUD	17.380.795.330	-	15
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	190.392.000	174.808.927	1
Penerbitan Izin Membuka Tanah	132.863.000	128.304.200	1
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.098.900	178.640.806	1
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.035.000	26.782.050	1
Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	423.803.000	417.203.000	2
Penataan Organisasi	260.000.042	259.895.630	3
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.316.198.650	3.316.044.467	2

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	514.905.800	514.839.138	3
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	432.173.064	432.032.371	4
TOTAL PER SASARAN	22.868.264.786	5.448.550.589	33
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari			
Penyelenggaraan Penataan Desa	211.458.100	210.829.650	1
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	128.722.300	127.387.986	3
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.766.093.520	3.719.595.887	6
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.116.340.000	1.114.935.266	4
TOTAL PER SASARAN	5.222.613.920	5.172.748.789	14
Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan			
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	115.018.512	31.686.183	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.285.050	212.572.561	1
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20.244.348.036	14.214.698.655	3
TOTAL PER SASARAN	20.599.651.598	14.458.957.399	5
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	31.978.500	31.427.000	1
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	102.101.600	101.883.557	1
Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.442.750	15.161.200	1
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	13.372.600	13.372.500	1
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.753.000	8.695.000	1
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.362.500	14.958.800	1
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	91.362.400	90.172.650	3

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.158.500	48.720.500	3
Pengelolaan Sampah	671.058.350	658.566.916	3
TOTAL PER SASARAN	1.000.590.200	982.958.123	15
Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah			
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.615.000	37.508.150	1
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.392.850	182.291.500	1
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.345.000	-	1
Investigasi Kejadian Kebakaran	7.242.500	4.817.700	1
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.621.500	21.959.500	1
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.571.000	185.589.750	4
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	146.351.300	145.264.212	3
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24.746.951.800	18.339.262.560	3
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	341.939.200	340.673.856	6
TOTAL PER SASARAN	25.691.030.150	19.257.367.228	21
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.486.450.000	6.383.027.594	3
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	849.376.880	844.086.880	1
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	357.224.650	356.782.345	1
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	115.605.900	105.356.000	2
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	29.993.700	29.093.400	2
TOTAL PER SASARAN	7.838.651.130	7.718.346.219	9

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEGIATAN
Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.956.942.196	2.875.344.240	1
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	747.482.500	695.623.410	1
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	104.767.300	103.706.800	1
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.442.411.456	1.418.557.368	2
TOTAL PER SASARAN	5.251.603.452	5.093.231.818	5
TOTAL KESELURUHAN	594.019.885.525,00	409.288.788.159,05	746



BAB IV PENUTUP



AYASA MAMAHU SETIAPU
TAKA ASETAMAU
BULNAD AMEG JUTUN
SANDANG NOT UTAS

BAB 4. PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarn Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab- bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 18 (delapan belas) sasaran strategis yang diukur oleh 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan "Sangat Berhasil", karena capaian rata-ratanya sebesar 105,77% dari target.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target jumlah nagari beradat dan berbudaya Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti memberikan pelayanan publik yang baik kepada

masyarakat, melaksanakan inovasi pelayanan public, menggerakkan secara massive Inovasi Daerah, serta memperkuat peran serta Bapppeda selaku fungsi perencanaan, fungsi pengawasan oleh Inspektorat serta fungsi koordinasi oleh Sekretariat Daerah. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.



**BUKTI DUKUNG
DAN PENGHARGAAN
S.ID/SAKIPRB**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KABUPATEN DHARMASRAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN
Jabatan : BUPATI DHARMASRAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pulau Punjung, November 2022
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022 PERUBAHAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	57
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	65
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	36,14
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	88,65
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	69,1
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,69
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,48
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,44
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	43,81
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3,25
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,68
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,08
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3,194
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot / Indeks	BB
		Nilai LPPD	Skor	3,6500
	Birokrasi yang berkualitas	Indeks SPBE	Indeks	1,9

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
11		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	65
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	3,03
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,8195
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,7056
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0,5950
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,93
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia	Indeks	130
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Percentase peningkatan zakat	Persen	12
		Percentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	80
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp. 23.039.300
2.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 54.830.000
3.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 38.292.991.266
4.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 16.060.008.987
5.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 7.578.404.398
6.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 851.212.000
7.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 104.996.700

8.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.	54.693.200
9.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	28.477.000
10.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.	391.657.000
11.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	50.765.500
12.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	40.995.100
13.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	41.239.400
14.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.804.395.280
15.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.	75.799.200
16.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.	17.380.795.330
17.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.465.357.420
18.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.201.025.820
19.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	607.550.000
20.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.	169.858.070
21.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp.	115.018.512
22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	240.285.050
23.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.257.354.500
24.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.347.408.700
25.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	14.127.765.580
26.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp.	20.244.348.036
27.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	51.621.610.535
28.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.	2.330.000
29.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.	12.641.000
30.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.	116.854.500
31.	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.	3.230.000

32.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp.	398.630.800
33.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp.	190.392.000
34.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	Rp.	68.525.400
35.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp.	5.064.311.900
36.	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Rp.	132.863.000
37.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1 (sepuluh) Ha	Rp.	4.036.736.960
38.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.	37.615.000
39.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	182.392.850
40.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp.	1.345.000
41.	Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp.	7.242.500
42.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp.	26.621.500
43.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	200.571.000
44.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp.	31.978.500
45.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp.	102.101.600
46.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp.	15.442.750
47.	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp.	13.372.600
48.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.753.000
49.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp.	16.362.500
50.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp.	91.362.400
51.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	50.158.500
52.	Pengelolaan Sampah	Rp.	671.058.350
53.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	146.351.300
54.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.	24.746.951.800
55.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp.	341.939.200
56.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	531.680.300
57.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	90.205.000
58.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	96.363.450

59.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	171.839.000
60.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	76.806.000
61.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp.	249.600.000
62.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp.	465.750.000
63.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geladangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp.	110.899.000
64.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	57.471.950
65.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp.	302.723.100
66.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	151.439.650
67.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	115.105.000
68.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp.	757.115.000
69.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.401.932.600
70.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp.	1.699.307.300
71.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	113.364.550
72.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.023.600
73.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp.	13.553.000
74.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	62.728.500
75.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp.	51.600.300
76.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp.	592.589.650
77.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp.	519.661.300
78.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	68.415.950
79.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	16.576.950
80.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	82.968.650
81.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp.	117.615.250
82.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	16.333.500

83.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp.	15.273.000
84.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	13.993.350
85.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	15.863.750
86.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	308.465.000
87.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp.	175.301.150
88.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	82402230
89.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp.	211.458.100
90.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Rp.	128722300
91.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3766093520
92.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1116340000
93.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	42.317.600
94.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	174.545.000
95.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	36.108.500
96.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp.	23.463.910
97.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	19.644.950
98.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp.	349143000
99.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp.	90350915
100.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp.	863753850
101.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	110.181.000
102.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	20.056.200
103.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	19.956.000
104.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3713667900
105.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp.	146.565.100
106.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	291.393.950

107.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	361.382.300
108.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp.	758.942.460
109.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp.	404890000
110.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	1479739250
111.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp.	2940524650
112.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp.	67968500
113.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	190.098.900
114.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.	50.411.350
115.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	588.994.650
116.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	27.035.000
117.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	74.239.368
118.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	360.216.000
119.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	597.692.900
120.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	242.032.250
121.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	602.971.900
122.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp.	136.869.700
123.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.956.942.196
124.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	747.482.500
125.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp.	104.767.300
126.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp.	110.257.250
127.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	226.641.000
128.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp.	55.876.750
129.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp.	1.007.343.800
130.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.442.411.456
131.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	235.000.000
132.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp.	37.396.270
133.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.	1.078.349.000
134.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.	423.803.000

135.	Penataan Organisasi	Rp.	260.000.042
136.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp.	3.316.198.650
137.	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp.	547.134.000
138.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	6.486.450.000
139.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.	514.905.800
140.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp.	157.351.150
141.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp.	180.976.650
142.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	432.173.064
143.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp.	76.540.900
144.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp.	12.643.000
145.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp.	928.863.100
146.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp.	386.320.250
147.	Mutasi dan Promosi ASN	Rp.	112.896.600
148.	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp.	639.287.350
149.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp.	176.923.700
150.	Layanan Administrasi DPRD	Rp.	179.660.000
151.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp.	11.532.243.000
152.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp.	683.685.000
153.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp.	7.477.846.500
154.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp.	2.510.143.000
155.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp.	18.246.253.000
156.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp.	695.329.000
157.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp.	1.744.163.150
158.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.	438.069.000
159.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.	422.775.900
160.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	112.090.871.813
161.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	591.991.500
162.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp.	756.788.150
163.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	31.096.900
164.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	20.669.900
165.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	334.356.000
166.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.	514.806.500
167.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	131.632.250
168.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	51.704.650
169.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	705.175.950
170.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.	43.207.500
171.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp.	155.343.600
172.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp.	729.974.550
173.	Pendampingan dan Asistensi	Rp.	768.997.500
174.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Rp.	849.376.880

	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		
175.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	357.224.650
176.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	115605900
177.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	29993700
178.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	914.975.800
179.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	9.364.492.704
180.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	49.050.524.134
181.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	11.427.010.708
182.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	74.881.501.561
183.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	845.502.150
184.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	92.852.750
185.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	1.650.000
186.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	23.860.000
187.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.	30.799.700
188.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	10.040.000
TOTAL ANGGARAN		Rp.	594.019.885.526



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

POHON KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

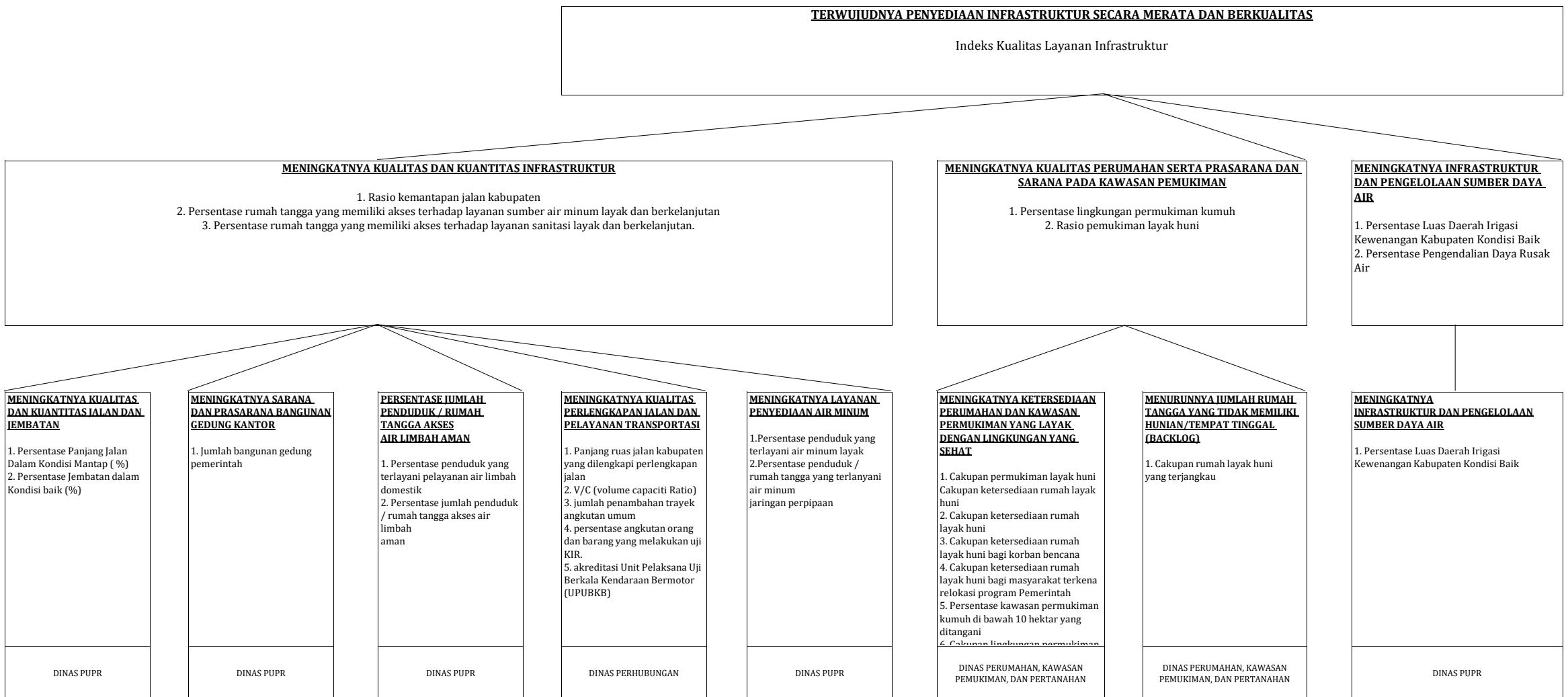
TAHUN 2021-2026

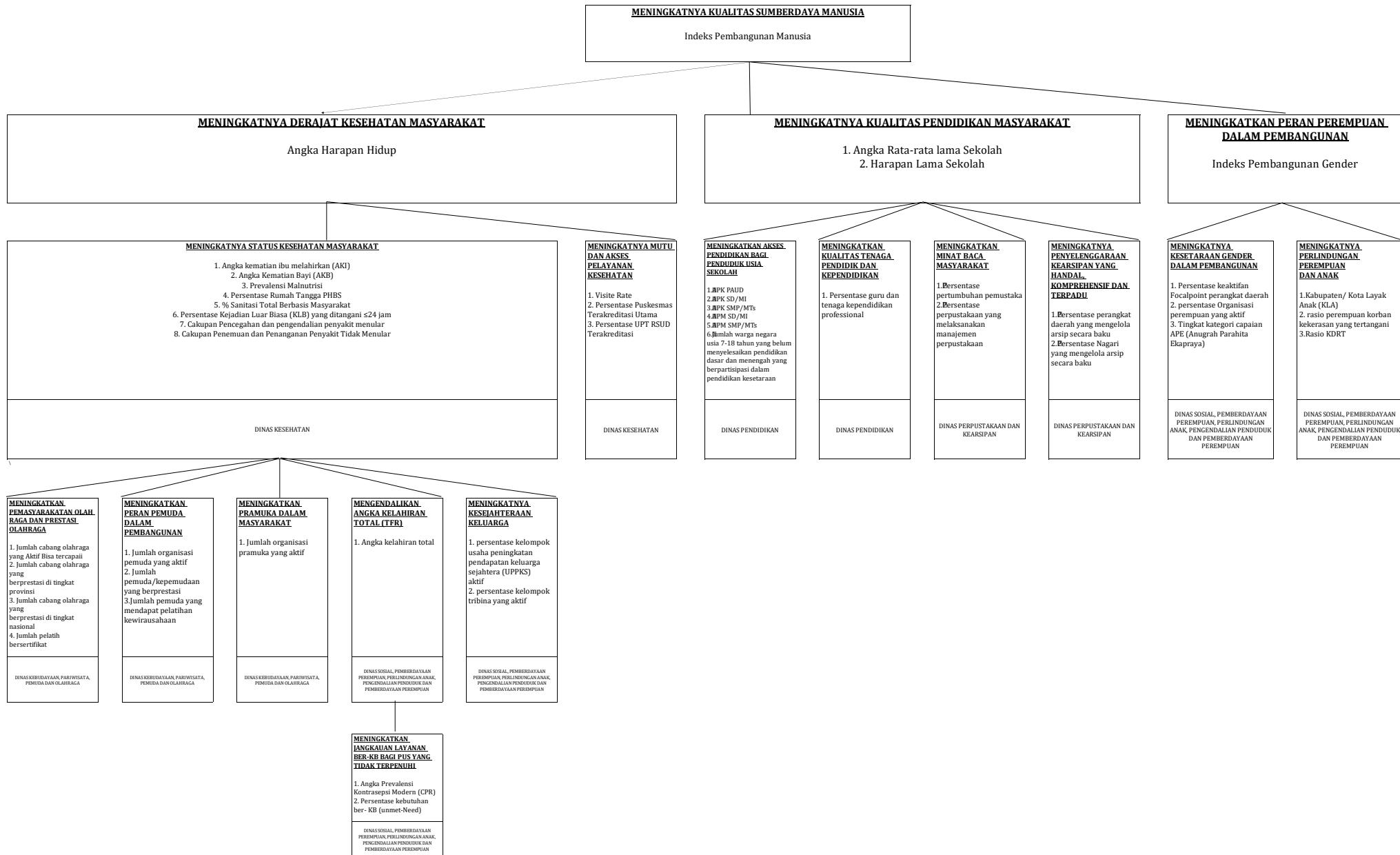
VISI

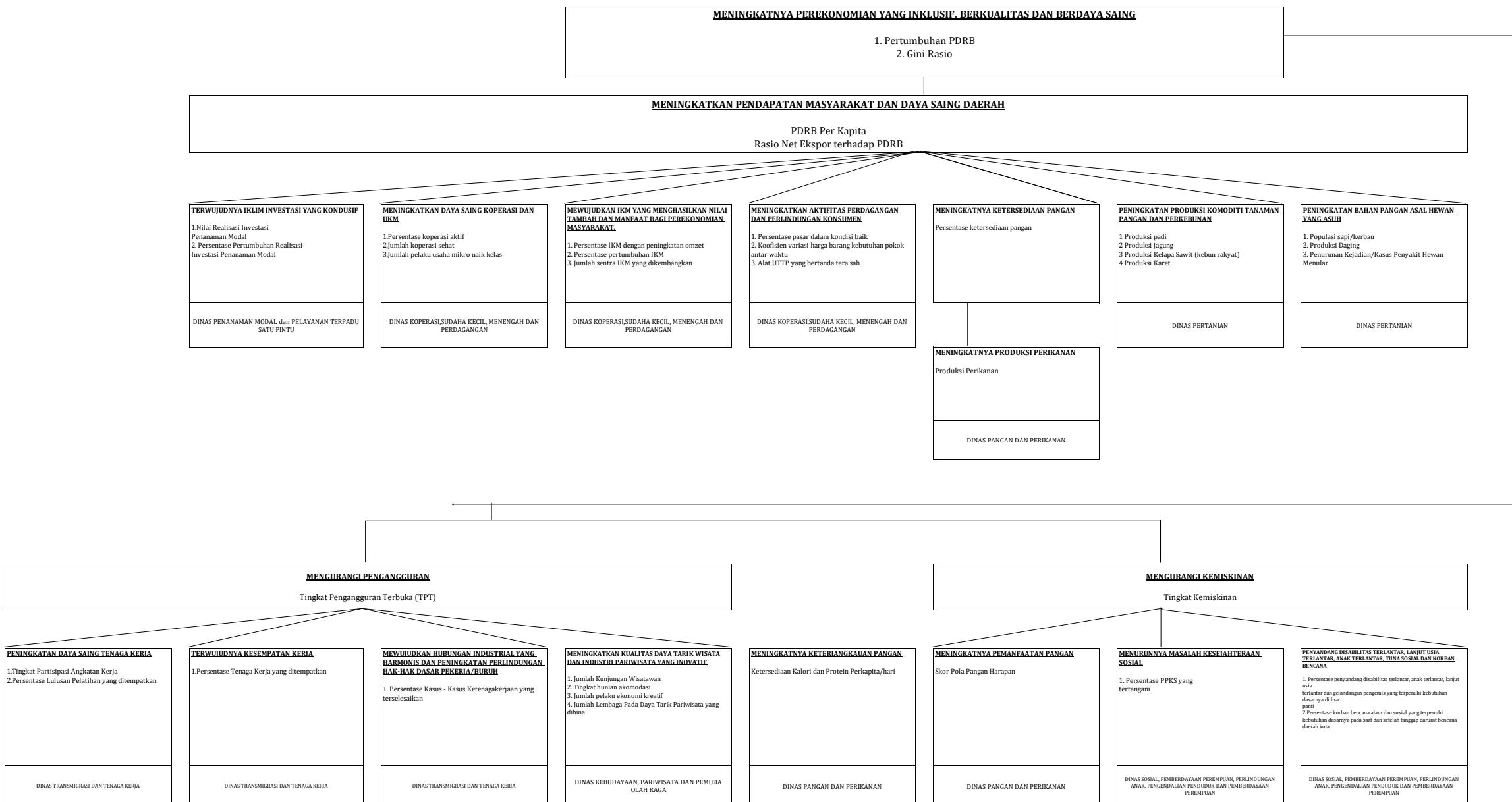
TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA

MISI

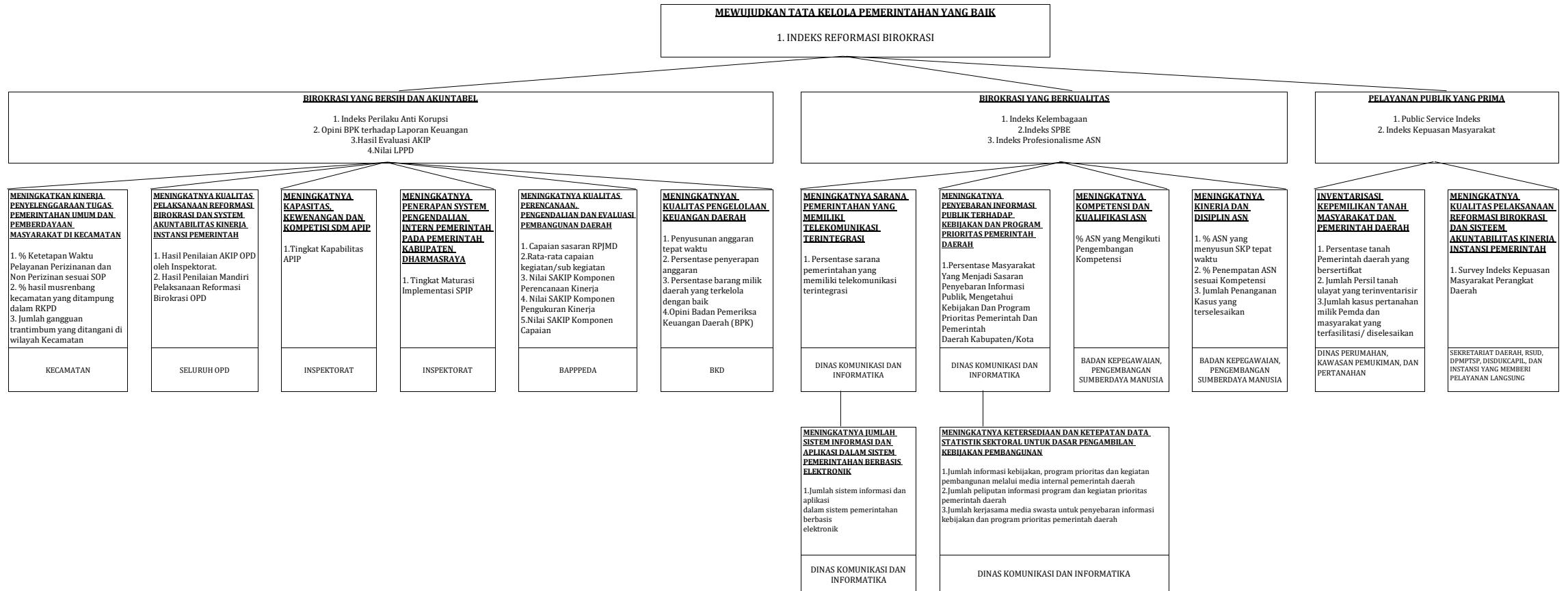
1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah







MISI 4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien



MISI 4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

MENINGKATNYA KEMAMPUAN NAGARI DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH DAN POTENSI SUMBERDAYA NAGARI

1. PERSENTASE NAGARI MANDIRI

MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI

1. Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial
2. Rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi
3. Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

1. Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nag berbasis IDM
2. Persentase APB nagari berbasis IDM
3. Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online
4. Persentase nagari memiliki bumnag berkembang

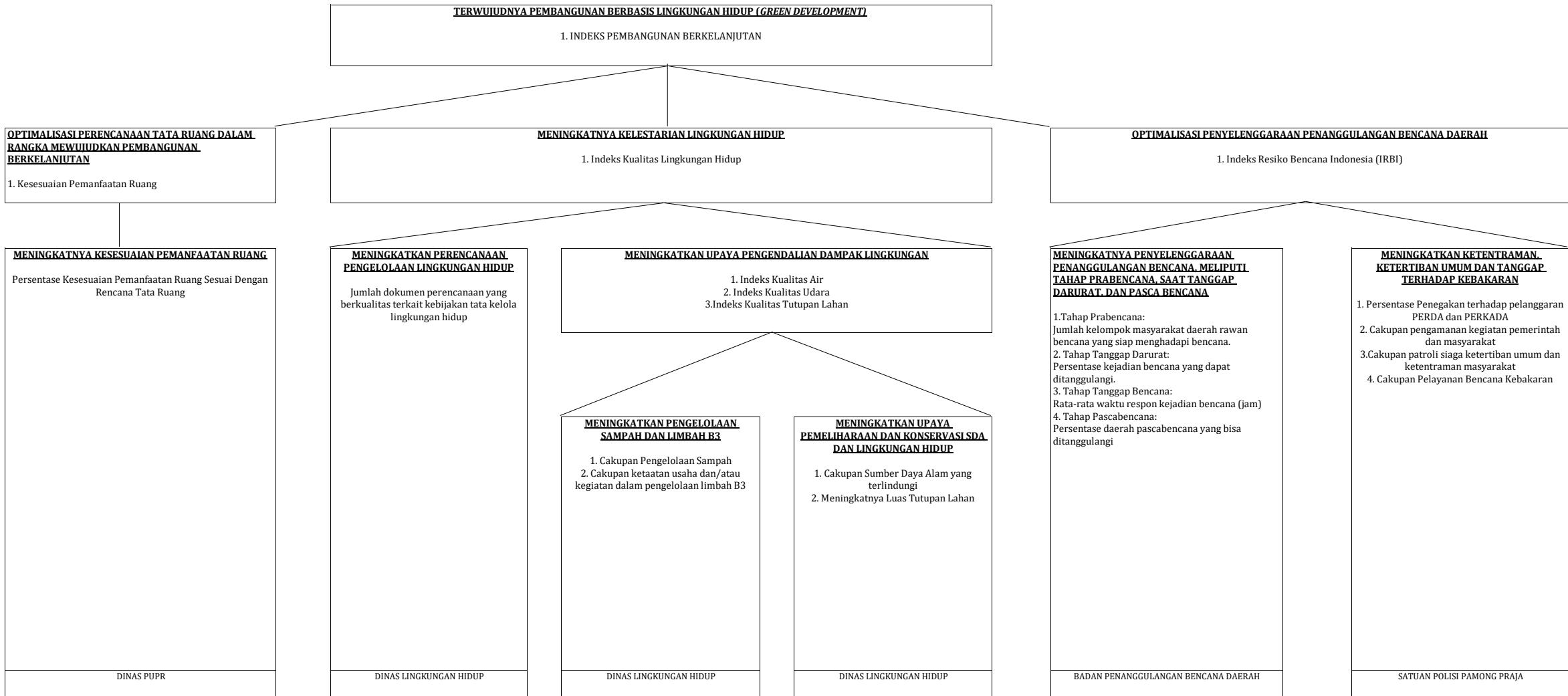
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR NAGARI DAN ATAU PIHAK KETIGA

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan
2. Jumlah Bumnag Bersama
3. Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan



MISI 6. MENINGKATKAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN DAERAH

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MENTAL, DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT DAN BUDAYA

1. Jumlah Nagari Beradat dan Berbudaya

MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Persentase Peningkatan Zakat
2. Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMA, ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

1.Jumlah Nagari Beradat dan Berbudaya

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Jumlah Konflik Sosial

KESBANGPOL

MENINGKATNYA PELESTARIAN SENI DAERAH

1. Jumlah group kesenian daerah yang dibina
2. Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH RAGA

MENINGKATNYA FUNGSI ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Persentase lembaga adat yang aktif

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH RAGA

MENINGKATNYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

- 1.Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH RAGA

MENINGKATNYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

- 1.Jumlah cagar budaya yang ditetapkan
2. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH RAGA